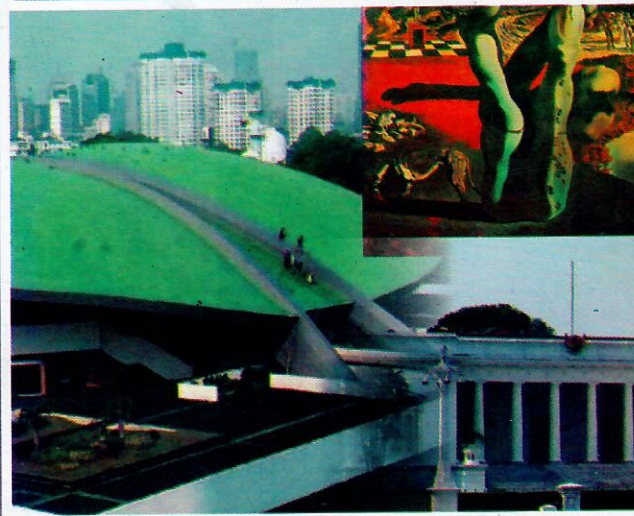


FILSAFAT PEMERINTAHAN

Dra.Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si





9 78-602-8845-09-0



BADAN PENERBITAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

FILSAFAT PEMERINTAHAN

cetakan :

Pertama Juni 2010

Penyusun :

Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si.

Setting :

Zaenal Mutaqin

Litbang

Desain Cover :

Badan Penerbitan Universitas Pancasakti Tegal

Hak Cipta @ 2009 pada Badan Penerbitan Universitas Pancasakti Tegal

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

penerbit :

Badan Penerbitan Universitas Pancasakti Tegal

ISBN

978-602-8845-09-0

Percetakan

CV.WIRA USAHA (Perc. Offset)

isi diluar tanggung jawab percetakan

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, kami menyambut baik usaha Dra.Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si. salah seorang dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah menyelesaikan penulisan buku ajar mata kuliah Filsafat Pemerintahan.

Dengan ditulisnya buku ajar ini diharapkan akan lebih melengkapi kepustakaan, bahan bacaan bagi mahasiswa, khususnya di jurusan Ilmu Pemerintahan, sehingga mahasiswa akan semakin mendalami materi perkuliahan dikemudian hari.

Apa yang ditulis dalam buku ajar ini sudah disesuaikan dengan silabi yang telah ditentukan sesuai dengan kurikulum, sehingga berharap akan mendapat perhatian sebaik-baiknya, khususnya dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal dan digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tegal, Juni 2010
Dekan FISIP UPS Tegal

Dra. Oemi Hartati, M.Si.
NIPY 4251421959



B A B I

PENGERTIAN DAN OBYEK FILSAFAT

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mengerti dan memahami pengertian filsafat, metode dalam mempelajari filsafat, filsafat pemerintahan dan obyek filsafat dan kebenaran dalam filsafat serta hakekat pemerintahan.

A. PENGERTIAN FILSAFAT

Secara etimologi, Filsafat berasal dari kata Yunani, yang tersusun dari dua kata, yaitu *Philos* yang berarti senang, gemar, cinta dan *Sophia* yang berarti kebijaksanaan. Dari dua kata tersebut, filsafat dapat diartikan sebagai “ *Suatu kecintaan pada kebijaksanaan* “. Menurut **Notonagoro** dalam Syafiie (2001 : hal. 1), filsafat mengkaji obyeknya dari sudut inti yang mutlak, terdalam, tetapi tidak berubah atau perenungan sedalam-dalamnya tentang sebab “ ada” dan “perbuat”. Filsafat menjawab pertanyaan yang terakhir dengan jawaban yang tidak dangkal dan dogmatis, tetapi dengan kritis sehingga kita sadar akan kekaburan dan kekacauan pengertian sehari-hari. Hal itu terjadi karena dalam mempelajari filsafat kita akan berpikir secara “ radix “ atau merenungkan segala sesuatu sampai ke hal yang sekecil-kecilnya (seakar-akarnya). Cara berpikir radix ini disebabkan kita sebagai makhluk politik mempunyai sifat ingin tahu yang besar terhadap segala sesuatu, sehingga menimbulkan keinginan untuk bertanya. Metode dialog yang dipakai dalam filsafat menyadarkan kepada diri kita tentang keterbatasan yang dimiliki manusia, sehingga dengan belajar filsafat kita akan menjadi orang yang rendah hati dan bijaksana. Selain itu dengan mempelajari filsafat kita akan menerima segala sesuatu dengan aktif, artinya tidak begitu saja menerima informasi secara mentah tanpa kita renungkan terlebih dahulu. Dengan mempelajari filsafat , wawasan kita semakin luas. Dari segi

praktis (pemakaian), Filsafat berarti ilmu yang menyelidiki fakta-fakta, prinsip-prinsip dari kenyataan (realita) dan dari tabiat manusia serta tingkah laku manusia. **Hasbullah Bakri** (1970 : 7) menyatakan dilihat dari segi pemakaian praktis, filsafat berarti alam berpikir atau alam pikiran. Berfilsafat artinya berpikir, tetapi tidak semua berpikir adalah berfilsafat, karena berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan dengan sungguh-sungguh. **Dr. Harun Nasution** dalam Abbas (1980 : 4) menyatakan bahwa intisari filsafat adalah berpikir menurut tata tertib (logika) dengan batas (tidak terikat pada tradisi,dogma serta agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar persoalan. Sementara itu **Prof.M.Nasrun, SH** (1967 : 13) menyatakan Falsafah itu adalah sebuah dari corak usaha manusia, dalam dia menghadapi, memecahkan dan menundukkan masalah yang mengenai ada dan hidupnya, yaitu yang akan memberikan kepuasan bagi dirinya. Dengan falsafah itu manusia akan berusaha mencapai tujuan yang telah ditentukannya, sehingga falsafah harus dapat dilakukan; kalau tidak, tentulah falsafah itu khayalan, mainan dan pikiran saja dan tidak akan membuahkan hasil yang nyata bagi kehidupan manusia tersebut. Filsafat menggunakan rasio sebagai alat untuk tujuan kebahagiaan manusia dan bukanlah manusia yang diperalat oleh rasio. Ada beberapa filsuf terkenal yang memberikan definisi filsafat, antara lain :

1. Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli.
2. Aristoteles; Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika,logika, retorika, etika, ekonomi, politik dan estetika.
3. Al Farabi, Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana alam maujud bagaimana hakekatnya yang sebenarnya.
4. Descartes, Filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikan

B. METODHE MEMPELAJARI FILSAFAT.

Dalam mempelajari filsafat, ada dua metodhe yang dipakai, yaitu :

1. Metodhe **Historis**, yaitu cara mempelajari filsafat dengan memperhatikan sejarah perkembangannya mulai dahulu sampai sekarang secara kronologis. Dalam metodhe ini dijelaskan riwayat hidup tokoh-tokoh filsafat yang terkenal serta bagaimana timbulnya aliran(paham) filsafat dalam segala persoalannya, bagaimana pendapatnya tentang logika, tentang metafisika, etika dan keagamaan,
2. Metodhe **Sistematis**, yaitu dengan cara memperhatikan isi, yaitu membahas langsung isi persoalan dari ilmu filsafat itu dengan tidak mementingkan urutan zaman penganjurannya masing-masing. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggolong-golongkan aliran filsafat itu serta bagian-bagiannya dalam bidang-bidang seperti etika, logika, metafisika dan sebagainya; serta dipersoalkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan salah tanpa memperhatikan sejarahnya.

C. OBYEK FILSAFAT

Obyek merupakan sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan atau persoalan, sehingga obyek merupakan sesuatu yang akan diamati, diteliti dan dipelajari serta dibahas sebagai kajian inti dari sebuah ilmu.

Ada dua macam obyek, yaitu obyek materia dan obyek forma.

C.1. Obyek Materia

Obyek materia dari sebuah disiplin ilmu bisa jadi merupakan obyek material ilmu yang lain, sehingga pokok bahasannya saling bertumpang tindih (*confergency*).Hal ini menyebabkan obyek materia disebut juga sebagai *subject matter*. Misalnya ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu Negara, membahas Negara sebagai obyek materinya sehingga disebut sebagai ilmu kenegaraan. Hukum pidana, hokum acara pidana, hokum acara perdata, hokum administrasi Negara yang membahas hukum sebagai obyek materinya, sehingga disebut ilmu hokum.

Filsafat sebagai induk segala ilmu memiliki obyek materia, yaitu *akal , budi dan rasa*.

Akal dipergunakan dengan mengoperasionalkan otak, berusaha mencari kebenaran sesuai dengan kemampuan ilmu pengetahuan kita masing-masing, sehingga akan menimbulkan logika yang menjadikan kita seorang intelektual, karena dapat membedakan antara yang benar dan yang salah secara tepat. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *logikos*, yang berarti pengetahuan, ilmu ataupun masuk akal, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan cara berpikir. Dengan demikian logika merupakan suatu tehnik yang mementingkan segi formal ilmu pengetahuan, karena dalam logika kita harus menghormati berbagai cara, aturan, teori dan metode supaya pernyataan itu menjadi sah.

Budi, moral atau akhlak berusaha mencari kebaikan sesuai dengan nilai-nilai luhur agama, adat istiadat atau bahkan lahir dari kata hati yang suci dan nurani yang jujur. Hal ini akan menimbulkan etika yang menjadikan kita seorang moralis (budiman) karena dapat membedakan antara mana perbuatan yang baik dan tidak baik atau buruk.

Etika berarti kesusilaan, yaitu kelakuan yang menuruti norma-norma kehidupan yang baik. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu **Ethos** yang berarti watak atau adat. Kata ini identik dengan asal kata Moral, dari bahasa latin, yang juga berarti adat atau cara hidup. Jadi kedua kata tersebut, yaitu etika dan moral menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan atau praktek sekelompok manusia. Dengan demikian etika dapat diratikan sebagai suatu atau sikap kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa taat dan patuh kepada seperangkat peraturan kesusilaan.

Rasa, dengan rasa, cipta dan karsa seseorang berusaha menemukan keindahan sesuai selera masing-masing. Hal ini akan menimbulkan estetika yang menjadikan seseorang tersebut menjadi seniman dengan kemampuannya membedakan yang indah dan yang jelek. Estetika berasal dari bahasa Yunani *Aisthesis* yang berarti pengamatan. Estetika berbicara tentang rasa yang mencakup penyerapan perhatian dalam pengalaman persepsi, sejauhmana seseorang mampu menimbulkan daya pendengarannya,

pandangannya, sentuhannya terhadap sesuatu. Dengan demikian, konsep estetika adalah abstrak karena tidak dapat dikomunikasikan sebelum diberi bentuk. Rasa dibangkitkan dari hasil seni ketika berusaha menimbulkan respon dari berbagai ragam obyek dan pengalaman.

C. 2. Obyek Forma

Obyek forma untuk masing-masing ilmu berbeda, hal ini terjadi karena perbedaan sudut pandang dari masing-masing ilmu tersebut. Pada hakekatnya obyek forma meninjau sasarannya berdasarkan satu sudut pandang saja, yakni secara khas dan khusus., sehingga obyek forma juga sering disebut sebagai *Focust of interest*.

Filsafat mempunyai obyek forma yakni *kebenaran*, karena kajian para ilmuwanlah yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Namun perlu digarisbawahi sebagian ilmuwan membedakan antara kebenaran ilmu dan kebenaran agama. Agama mengurus persoalan akherat yang transendental, sedangkan ilmu mengurus persoalan dunia yang sekuler. Selain itu agama bersifat keyakinan yang dogmatis terhadap ritual hubungan mereka dengan Tuhan, sedangkan ilmu berawal dari keraguan yang akan dibuktikan dengan akal.

D. KEBENARAN ILMU DAN KEBENARAN AGAMA

Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa obyek forma filsafat adalah kebenaran, maka kita akan mencari hakekat kebenaran itu sendiri. Dalam mencari kebenaran ada dua sudut pandang yang berbeda, yakni kebenaran menurut ilmu dan kebenaran menurut agama. Berbicara kebenaran, pastilah berbicara kaitan antara ilmu dan moral. Ilmu tanpa moral menimbulkan kemarahan, kelumpuhan dan ketiraniah, sebaliknya moral tanpa ilmu akan menimbulkan kebutaan dan kesesatan.

Kebenaran, menurut Bradley dalam Syafiie (2001 : 27) adalah kenyataan. Misalnya untuk membuktikan bahwa hari benar-benar panas, kita harus melihat kenyataan yang terjadi di luar rumah. Namun perkembangan kemudian, ternyata kenyataan yang terjadi tidak seluruhnya berupa kebenaran, bahkan yang tidak seharusnya, karena das sollen memang tidak selamanya sama dengan das sein.. Hal ini terbukti banyaknya

peristiwa perampokan, pencurian, pembunuhan, yang seharusnya tidak perlu terjadi, karena hal itu tidak dibenarkan. Aristoteles bahkan mengatakan bahwa kebenaran bersifat subyektif. Benar menurut si A belum tentu benar menurut B. Dengan demikian kebenaran menurut ilmu atau para pakar tidak bersifat mutlak, artinya kebenaran itu bersifat relative. Namun demikian apabila kebenaran itu tidak ada, yang terjadi adalah kerancuan di dunia, sehingga batas benar dan salah menjadi kabur.

Untuk mengerjakan sesuatu agar diperoleh pengertian ilmiah terhadap suatu kebenaran, diperlukan metodologi, namun sering ilmu memandang sesuatu berdasarkan sudut pandang tertentu, sehingga muncullah yang disebut paradigma. Paradigma adalah corak berpikir seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu pengetahuan yang menolak bentuk lama dengan memunculkan bentuk baru dalam revolusi ilmu pengetahuan itu sendiri.

Ilmu pengetahuan yang kita pelajari ternyata mempunyai keterbatasan dalam kompetensinya, antara lain :

1. Kebenaran ilmiah bersifat nisbi dan tidak mutlak. Ilmu pengetahuan tidak pernah dapat mengungkapkan kebenaran hakiki, bahkan kebenaran absolute pun sulit ditemukan, karena ilmu pengetahuan hanya mampu menjelajah sejauh indera manusia, akal pikiran dan pemahaman manusia yang terbatas,
2. Semua cabang ilmu beranjak dari keterbatasan itu sendiri, sehingga kemudian muncul pengertian asumsi, hipotesis atau dugaan sementara.

Agama adalah suatu unsure mengenai pengalaman yang dipandang mempunyai nilai tertinggi, pengabdian kepada suatu kekuasaan yang dipercayai sebagai sesuatu yang menjadi asal mula, yang menambah dan melestarikan nilai-nilai dan sejumlah ungkapan yang sesuai tentang urusan serta pengabdian tersebut, baik dengan jalan melakukan upacara simbolis maupun melalui perbuatan lain yang bersifat perseorangan ataupun kemasyarakatan.

Agama adalah cara yang dipakai manusia dalam menghidupkan hubungannya dengan kekuatan-kekuatan di atas jangkauan manusia dengan yang gaib, serta pada kekuatan-kekuatan tersebutlah kepercayaan manusia itu menggantungkan harapannya. Agama

adalah petunjuk bagi manusia untuk membedakan baik buruk, benar salah dan indah ataupun jelek. Petunjuk itu berasal dari Tuhan yang dapat dibuktikan keberadaannya melalui etika, logika dan estetika. Pembawa beritanya disebut Nabi dan petunjuknya disebut Kitab Suci.

Orang yang memiliki paham untuk memisahkan nilai-nilai luhur agama dari kehidupan termasuk dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai paham sekularisme dan orangnya disebut sekularis. Tetapi tidak sedikit ilmuwan yang beranggapan bahwa puncak perenungan dan pemikiran terdalam seorang ilmuwan adalah Tuhan, karena pada gilirannya, ilmuwan akan memikirkan awal dari segala awal yang menciptakan pengaturan alam. Selain itu di dunia ini masih ada akal, budi dan keindahan yang tidak boleh tidak pasti berasal dari Sesuatu yang Berkehendak. Jadi Tuhan adalah sesuatu yang dengan sadar, kita didominasi oleh Nya, baik bagi mereka yang mempercayai hanya dengan rasa maupun mereka yang mempercayainya dengan proses perenungan logika.

E. PENGERTIAN FILSAFAT PEMERINTAHAN

Sebelum kita mendefinisikan pengertian Filsafat Pemerintahan, akan disajikan kembali pengertian pemerintahan.

Secara Etimologis, pemerintahan berasal dari kata “ **Perintah** ” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

1. Mendapat awalan “ pe ” menjadi kata “Pemerintah ” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu Negara,
2. Mendapat akhiran “ an ” menjadi kata “ Pemerintahan ” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut.

Kata “ **Perintah** ” sebagai bentuk dasar, mengandung paling sedikit empat unsure, yaitu :

1. Ada dua pihak, yaitu pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah,

2. Pihak yang memerintah mempunyai kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyat yang diperintah,
3. Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada yang memerintah,
4. Antara pihak pemerintah dan yang diperintah terdapat hubungan timbal balik baik secara vertical maupun horizontal.

Ada beberapa pakar yang mendefinisikan pemerintah atau pemerintahan, antara lain :

- 1) **W. S. Sayre** dalam Syafiie (2001 : 45) , pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.
- 2) **Taliziduhu Ndraha** (2005 : 2), mendefinisikan pemerintahan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah.
- 3) **Bayu Surianingrat** (1980 : 11), mendefinikan Pemerintahan adalah perbuatan atau cara atau urusan memerintah, misalnya pemerintahan yang adil, pemerintahan yang demokratis, pemerintahan dictator dan sebagainya,
- 4) **Mac. Iver**, mendefinisikan pemerintahan sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan..... bagaimana manusia itu bisa diperintah.
- 5) **Wilson**, mendefinisikan Pemerintah sebagai suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Dari berbagai definisi pemerintahan dan filsafat di atas, dapat kita simpulkan bahwa filsafat pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang meninjau pemerintahan dari konsep- konsep filsafat yang ada.

F. KESEIMBANGAN PEMERINTAHAN

“ Baik ‘ dalam pengertian filsafat harus dibedakan dengan “benar “, karena ada perbuatan yang benar tetapi tidak baik, begitu juga sebaliknya ada perbuatan yang tidak benar, tapi baik. Hal ini karena masih dijumpai aparat pemerintah yang benar dalam tindakan kenegaraannya, tetapi tidak baik secara moral, misalnya :

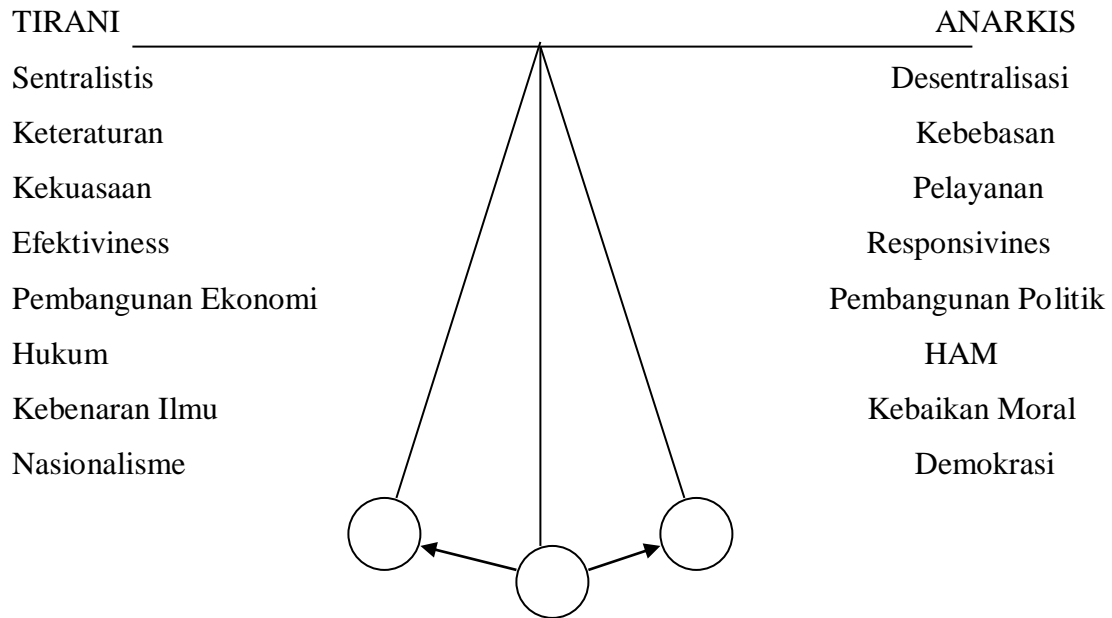
1. Memaksakan pembangunan ekonomi dengan cepat, sehingga kebijaksanaan eksekutif tidak boleh diganggu dengan mosi tidak percaya,
2. Penataan keindahan kota dengan jalan menggusur pedagang kaki lima tanpa memberi solusi terbaik.

Namun sebaliknya, ada aparat pemerintah yang baik secara moral, tetapi tidak benar dalam logika kenegaraan, misalnya :

1. Berdalih demi hak asasi manusia, maka pemerintah memberi kebebasan masyarakat untuk mendirikan tempat prostitusi, judi dan sebagainya demi mendapatkan kesenangan masyarakat,
2. Tidak memberikan hukuman yang setimpal terhadap kejahatan yang dilakukan pejabat maupun keluarganya demi alasan loyalitas.
3. Peningkatan kebebasan berdagang serta bersaing, sehingga muncul para konglomerat yang kapitalis sifatnya.

Dari beberapa contoh di atas sebenarnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan keseimbangan antara moral dan kebenaran secara logika. Hal ini cukup beralasan, mengingat sebagai pelayan masyarakat harus dapat berbuat adil demi terciptanya kedamaian dalam masyarakat. Moral harus selalu dijadikan sebagai landasan dalam setiap tingkah laku aparat.

Untuk melihat bagaimana keseimbangan dalam berbagai langkah pemerintah, di bawah ini dibuat bagan untuk lebih memperjelas uraian di atas.



Sumber : The Balancing Teoris dari Filsafat Pemerintahan

Dari bagan di atas, ada beberapa yang harus diseimbangkan antara lain :

1. Apabila kita menanggapi (responsiveness) seluruh kepentingan masyarakat, maka pencapaian hasil cenderung lama, karena multi dimensional kebutuhan masyarakat sulit disatukan, sebaliknya, bila kita mengutamakan pencapaian hasil (effectiveness), maka banyak pihak yang cenderung terintimidasi dengan terpaksa, misalnya penggusuran tukang becak dengan keindahan kota.
2. Apabila kita memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam rangka pendemokrasian daerah, dikhawatirkan akan terjadi separatisme. Sebaliknya, bila kita sentralistis dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa, nampak kekakuan birokrasi, urusan yang bertele-tele ditentukan serba terpusat.
3. Apabila kita meningkatkan pelayanan kepada swasta, perlu diantisipasi pemenang tender adalah yang mampu bernegosiasi, kolusi, bukan keahlian. Sebaliknya, bila kita hanya mengatasnamakan kekuasaan Negara, perlu

disadari bahwa banyak pihak yang bekerja karena terpaksa, bukan karena kesadaran.

4. Apabila kita mendahulukan pembangunan politik dengan memberikan peran yang besar kepada legislative, maka akan sering terjadi mosi tidak percaya, sehingga cabinet mudah jatuh dan pembangunan ekonomi terabaikan. Sebaliknya bila kita mendahulukan pembangunan ekonomi, kita cenderung membiarkan peran eksekutif membesar (dengan control harga, pengusaha , uang) sehingga legislative yang mewakili suara rakyat terabaikan, dan terjadilah kemunduran pembangunan politik.
5. Apabila kita mengutamakan ketertiban, berbagai peraturan harus ditegakkan, namun resikonya berbagai pihak tidak tentram. Misalnya penertiban pedagang kaki lima. Sebaliknya bila kita mengutamakan ketentraman, maka ketertiban sulit terwujud.

G.HAKEKAT PEMERINTAHAN

Dalam sebuah masyarakat, apabila tidak terdapat seorang pemimpin pemerintahan, maka kebebasan murni masyarakatnya akan menimbulkan anarkhis, karena tidak ada pengaturan ekonomi, politik, hokum sampai pada dekadensi moral. Tingkat tertinggi pengaturan disebut pemerintahan Negara, yang secara tradisional disebut dengan pemerintah sebagai penjaga malam. Kekuasaan dan kekuatan pemerintahan Negara yang semula ditujukan untuk terciptanya ketertiban, keteraturan, keutuhan dan persatuan, terkadang disalahgunakan untuk kepentingan kelompok yang berkuasa, elit pemerintah tidak memperhatikan rakyatnya, kesejahteraan hanya pada segelintir orang, karena hasil bumi dibagi secara tidak merata. Pada gilirannya akhirnya muncul Negara yang mengeksploitasi tenaga rakyat. Mereka yang membangkang dianggap separatisme, teroris, pengacau keamanan dan sejenisnya. Kecuali pemberontak tersebut mampu mengambil alih pemerintahan, baik melalui revolusi, reformasi maupun pemilihan umum.

Pemerintahan pada abad 20 ini berjuang untuk menggeser paradigma kekuasaan kepada paradigma pelayanan. Pemerintah dijadikan abdi masyarakat dengan ukuran apabila rakyat membutuhkan, akan dilayani dengan cepat, tepat, murah dan bermutu sehingga menimbulkan kepuasan masyarakat. Dalam pengkajian pemerintahan harus berangkat dari pembahasan filsafati, apa yang baik dan benar bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Pemegang kekuasaan adalah pemerintah yang sah berkuasa karena mempunyai legitimasi untuk menghukum, memenjarakan dan menangkap. Oleh karena itu, pemerintah harus terdiri para ulama yang adil dan jujur.

=====

RINGKASAN

Mempelajari filsafat secara terminology sangat penting untuk sampai pada pengertian filsafat pemerintahan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan sungguh-sungguh, radikal, sehingga mencapai hakekat segala situasi tersebut. Ada dua obyek yang dipelajari dalam filsafat, yakni obyek material dan obyek forma, yang masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri. Untuk mempelajari filsafat kita menggunakan metode histories dan sistematis. Filsafat pemerintahan sebagai salah satu kajian filsafat, mengadakan analisa pemerintahan dari sudut pandang atau konsep-konsep yang ada dalam filsafat. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu dilakukan keseimbangan antara berbagai variable yang mempengaruhi jalannya pemerintahan, karena pada hakekatnya pemerintah adalah pelayan masyarakat, sehingga moral harus menjadi pangkal tolak perilaku dari aparatnya.

EVALUASI

1. Jelaskan pengertian filsafat dan filsafat pemerintahan ?
2. Jelaskan obyek forma dan obyek material dari filsafat ?
3. Jelaskan metodhe yang diapakai dalam filasafat ?
4. Jelaskan beberapa keseimbangan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan ?
5. Jelaskan hakekat dari pemerintahan ?

REFERENSI

1. Syafiie, Filsafat Pemerintahan, Mencari bentuk Good Governance yang sebenarnya secara Universal, PT Perco, Jakarta, 2001.
2. Sudarsono, Ilmu Filsafat Suatu Pengantar, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
3. Bakry, Systematik Filsafat, Widjaya, Jakarta, 1989,
4. Abbas, Pengantar filsafat alam, Al Ikhlas, Surabaya, 1981

B A B II

FILSAFAT YUNANI KUNO SEBELUM SOKRATES

TUJUAN PEMBELAJARAN :

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mengetahui mengapa referensi filsaf Yunani Kuno masih kita pakai dalam menganalisa kehidupan pemerintahan saat ini dan mengetahui beberapa filsuf sebelum Sokrates serta pandangan Sokrates dalam filsafat pemerintahan.

A. FILSAFAT YUNANI KUNO

Berbicara atau membahas filsafat pemerintahan pada saat ini, kita tidak dapat meninggalkan referensi yang dihasilkan oleh Filsuf Yunani, karena dari sanalah masalah-masalah pemerintahan mulai diperhatikan, di mana masalah tersebut masih relevan dengan pembahasan pemerintahan dewasa ini, misalnya pemimpin yang ideal seperti apa, bagaimana kedudukan individu dalam pemerintahan, bagaimana sebaiknya pemerintah mengurus masyarakatnya, dan sebagainya.

Pemikiran politik di Yunani Kuno, tidak muncul secara tiba-tiba, namun dimulai dari pemikiran tentang alam semesta, baru abad ke 5 SM, perhatian dititikberatkan pada masalah kosmos kecil, yakni dunia serta masalah hubungan sesama manusia dan hakekat masyarakat dan Negara. Pemikiran yang demikian muncul, karena orang Yunani Kuno sudah dapat melepaskan diri dari pemikiran yang menerima apa saja sesuai nasib dan ketentuan dari yang bersifat gaib serta berdasarkan keyakinan dan kepercayaan semata. Namun bukan berarti masyarakat Yunani tidak mempunyai kepercayaan atau agama, bahkan sebaliknya mereka sangat kuat memegang teguh agamanya, namun memisahkan pemikiran dengan agama. Yunani Kuno merupakan Negara di Eropa yang mempunyai wilayah yang sangat sempit, sehingga sering disebut sebagai “ Polis “ atau negara sebatas kota. Di sana ada dua Negara bagian yang besar, yaitu Athena yang terkenal demokrasinya dan Sparta yang terkenal militernya.

Ada beberapa penyebab orang Yunani Kuno memberikan perhatian yang besar kepada masalah masyarakat Negara dan masyarakat pada umumnya, yaitu :

1. Negara mereka yang disebut *Polis* sering mengalami pergantian sifat pemerintahan, dari monarchi ke aristokrasi, dari aristokrasi ke tirani dan dari tirani ke demokrasi. Kejadian ini menimbulkan pemikiran baru untuk mendapatkan jawaban tentang pemerintahan yang ideal seperti apa, bagaimana hubungan dengan masyarakatnya dan menimbulkan falsafah bernegara dan bermasyarakat,
2. Karena bicara, bukan kekerasan senjata yang lebih diutamakan. Penyelesaian masalah dengan adu argumentasi, bukan dengan pedang,
3. Negara disamakan dengan masyarakat dan sebaliknya masyarakat identik dengan Negara. Karenanya masalah Negara adalah masalah masyarakat dan masalah masyarakat adalah masalah Negara,
4. Pemberian nilai yang tinggi kepada “ *leisure* “, yaitu keluangan waktu serta kebebasan dari tekanan dan paksaan hidup lahir seperti soal nafkah hidup Orang Yunani kuno lebih banyak mencurahkan perhatian pada cara dan usaha untuk memperoleh keluangan waktu sehingga dapat memperhatikan masalah-masalah bersama. Masalah-masalah berat yang berkaitan dengan fisik diserahkan kepada hamba sahaya, sehingga Negara atau masyarakat tanpa hamba sahaya tidak masuk akal.

Perhatian kepada masalah-masalah Negara dan masyarakat, mendapat kemudahan dengan adanya kontak langsung antar warga masyarakat yang dapat dilakukan di setiap saat dan kesempatan serta di setiap tempat, misalnya di pasar, masjid. Disitulah masyarakat dapat melakukan adu argumentasi dalam memecahkan persoalan masyarakat. Kehidupan yang demikian didorong oleh rasa kekeluargaan bukan karena kepentingan diri sendiri.

-

.

B. FILSOF SEBELUM SOCRATES

Sebagaimana di jelaskan di muka, sebelum Socrates, masyarakat Yunani Kuno pemikirannya masih diliputi oleh kosmologis, terutama mencari hakekat atau asal-usul alam ini.

.Sebelum Socrates, ada beberapa filsuf yang terkenal, antara lain :

1. Thales (625- 545 SM).

Thales adalah seorang filsuf yang mempunyai latar belakang saudagar sekaligus seorang politikus, dan masih sempat mempelajari matematika dan astronomi. Thales terkenal sebagai bapak filosofi Yunani, sebab dialah filosof yang pertama, dan tidak meninggalkan tulisan.

Ajaran yang terkenal dari Thales adalah “ bahwa segala sesuatunya berasal dari “ air “ .Air merupakan pokok dan dasar segala-galanya. Semua barang terjadi dari air dan semua kembali kepada air pula. Dalam pandangannya, tidak ada jurang yang memisahkan hidup dengan mati. Semuanya satu.

2. Anaximenes (585 – 528 SM)

Menurut Anaximenes, segala sesuatu berasal dari udara. Udara yang membalut dunia ini menjadi sebab yang hidup. Jika tidak ada udara, tidak ada yang hidup, menurutnya, sebagaimana jiwa kita, yang tidak lain adalah udara, menyatukan tubuh kita, demikian pula udara mengikat dunia menjadi satu. Melalui pemikiran Anaximenes, maka pertama kali pengertian Jiwa (roh) masuk dalam ruang lingkup filsafat. Jiwa menyusun tubuh manusia menjadi satu dan menjaga supaya tubuh jangan gugur dan bercerai berai . Kalau jiwa keluar dari badan, matilah badan itu dan bagian-bagiannya mulai bercerai berai. Alam besar ada juga karena udara. Udaralah yang menjadi dasar hidupnya, kalau tidak udara, gugurlah semua itu. Menurut pandangannya udara itu merupakan benda, materi. Tetapi walaupun hidup dipandang sebagai benda, tetapi dia membedakan yang hidup dan mati. Badan mati, karena menghembuskan jiwa itu keluar, yang mati tidak berjiwa.

3. Herakleitos (540 – 480 SM)

Menurut Herakleitos, segala sesuatu berasal dari api. Api lebih daripada air dan udara dan setiap orang dapat melihat sifatnya sebagai mudah bergerak dan mudah bertukar rupa. Api membakar semuanya, menjadikan semuanya menjadi api dan akhirnya menukarnya lagi menjadi abu. Semuanya bertukar menjadi api dan api bertukar menjadi semuanya.

Walaupun Herakleitos memandang api sebagai anasir yang asal, pandangannya tidak semata-mata terikat pada alam luaran, alam besar. Apa yang bergerak dan berubah itu menyatakan, bahwa tidak ada yang tenang dan tetap. Tidak ada yang boleh disebut ada, melainkan menjadi. Semuanya itu dalam kejadian. Segala kejadian di dunia ini serupa dengan api, yang tidak putus dengan berganti-ganti memakan dan menghidupi dirinya sendiri. Segala permulaan adalah mula dari pada akhirnya. Segala yang hidup mula dari pada yang mati. Dalam dunia ini semua berlaku. *Panta rei*, semuanya mengalir.

4. Pythagoras

Pemikiran Pythagoras didasarkan pada agama dan paham keragaman, dia percaya adanya perpindahan jiwa dari makhluk yang terdahulu kepada yang kemudian. Apabila seseorang meninggal dunia, jiwanya kembali lagi ke dunia, masuk ke dalam badan salah satu hewan. Menurutnya, manusia itu asalnya Tuhan. Jiwa merupakan penjelmaan dari Tuhan yang jatuh ke dunia karena berdosa, dan ia akan kembali ke langit dalam lingkungan Tuhan, apabila sudah dicuci dosanya itu. Hidup murni adalah jalan untuk menghapus dosanya, tetapi kemurnian tidak dicapai sekaligus, namun berangsur-angsur. Untuk mencapai kemurnian hidup, orang harus berpantang daging dan kacang, sehingga dia terkenal sebagai penganjur vegetarian. Hidup di dunia merupakan persediaan untuk akherat. Selain ahli mistik, Pythagoras juga terkenal sebagai ahli piker, terutama matematika, sehingga kita mengenal bilangan Pythagoras dan segitiga Pythagoras. Alam ini tersusun dari angka-angka.

5. Empidokles (490 – 430 SM)

Menurutnya manusia berasal dari Tuhan, ia jatuh karena berdosa. Hidup di dunia adalah hukuman baginya untuk menghapuskan dosanya itu. Apabila dosanya sudah habis, barulah manusia kembali kepada asalnya. Jalan penghapusan dosanya adalah hidup berkorban membersihkan diri. Dia sendiri merasa dirinya sebagai Tuhan yang terbuang.

Empedokles mengajarkan bahwa alam ini pada mulanya satu, disatukan oleh cinta. Cinta adalah kodrat yang membawa bersatu, bercampur. Tetapi alam yang satu tadi dipecah oleh benci, kodrat yang menjadi pangkal perpisahan dan persengketaan. Karena benci itulah sukar hidup di dunia ini. Tetapi orang jangan lupa, bahwa manusia asalnya Tuhan dan akhirnya akan kembali juga menjadi Tuhan. Karenanya hendaklah dia hidup berkasih-kasih, cinta mencintai satu sama lain. Cinta itu akan menemukan kembali jalan pulang ke langit yang suci, ke dalam pangkuan Tuhan.

Alam tersusun menjadi empat anasir, yaitu udara, api, air dan tanah. Keempatnya masing-masing memangku sifat yang empat pula, yaitu dingin, panas, basah dan kering. Karena segala sesuatu berasal dari 4 anasir tersebut, maka “ timbul “ dan “ hilang “ tidak boleh terjadi, yang ada cuma percampuran dan perpisahan. Dari percampuran tersebut terjadi barang yang ada di dunia, dan dari perpisahan anasir itu lenyaplah barang tadi.

6. Demokritos (460 – 360 SM)

Menurut Demokritos, alam ini tidak lain adalah atom dan gerakannya. Atom tidak bermula dan tidak berakhir, ada selama-lamanya. Atom adalah benda bertubuh, walaupun sangat halus tubuhnya. Di antara atom yang banyak itu terdapat tempat yang kosong, tempat atom itu bergerak.

Setelah Demokritos, di Yunani muncul aliran baru dalam filsafat yang disebut *Sofisme*. Sofisme berasal dari kata “ Shopos “ yang artinya cerdik pandai yang mencakup ahli filsafat, ahli bahasa dan ahli politik. Dalam perkembangan selanjutnya sebutan sofis menjadi ejekan, karena istilah sofis bermakna orang yang

pandai memutar lidah, pandai bermain kata-kata. Kaum Sofis ini merupakan golongan yang kerjanya memberikan pelajaran kepada orang yang menghendaknya dengan memungut bayaran, sehingga lebih mementingkan bayarannya daripada isi pengetahuan yang sesungguhnya. Golongan ini mengutamakan ajaran-ajaran praktis, sesuatu yang mudah dengan cepat digunakan, misalnya cara-cara berpidato, lepas dari kebenaran yang dikandungnya. Kaum sofis berpandangan bahwa “ Kebenaran yang sebenar-benarnya tidak terjadi “. Karenanya tipa pendirian boleh benar dan boleh salah menurut pandangan manusia.

Setelah pemikiran kaum sofis berakhir, maka bergeserlah pemikiran klasik di bidang filsafat yang tertuju kepada pencarian dasar baru dan kuat bagi model kebenaran. Pelopor ajaran ini adalah **SOCRATES** yang lahir 469 SM. Socrates merupakan seorang yang kuat jasmaniahnya dan pernah membela dalam peperangan dan aktif dalam politik. Namun kemudian dia mengundurkan diri dari dunia politik dan mencurahkan pada masalah- masalah masyarakat. Metode yang dipakai oleh Socrates yaitu dengan dialog, sehingga ajarannya terkenal dengan dialektika. Dengan ajaran ini, ia menemukan suatu cara berpikir induksi, yaitu suatu penyimpulan dari beberapa hal yang khusus menghasilkan pengetahuan yang bersifat umum.

Menurut Socrates, jiwa manusia bukanlah nafasnya semata-mata, tetapi atas hidup manusia dalam arti yang lebih mendalam. Jiwa merupakan intisari manusia, hakekat manusia sebagai pribadi yang bertanggungjawab. Oleh karenanya, manusia wajib mengutamakan kebahagiaan jiwanya, lebih dari kebahagiaan tubuhnya atau lahiriahnya, misalnya kesehatan, kekayaan dan sebagainya. Jika manusia hanya hidup saja, hal itu belum ada artinya, orang harus hidup baik. Jadi persoalannya adalah bagaimana orang dapat mencapai kebahagiaan. Alat untuk mencapai kebahagiaan adalah kebajikan atau keutamaan, yang tidak saja diartikan secara moral tetapi lebih luas dari itu, artinya mempunyai pengetahuan di bidangnya. Pendirian Socrates yang terkenal adalah “ Keutamaan adalah pengetahuan “. Socrates mengaku seorang yang tidak tahu apa- apa, suatu sikap yang terkenal sebagai “ ironi Socrates “. Karena orang merasa tidak tahu apa-apa, ia pun mengemukakan pertanyaan kepada orang-

orang, dan setiap pertanyaan disambut dengan pertanyaan baru, akhirnya orang kehabisan pertanyaan dan jawaban, sehingga orang merasa ragu kepastian tahunya, akhirnya potensi seseorang akan terbuka dan merasa kebodohan yang kelihatan. Dalam mengajarkan ilmunya Socrates berhadapan dengan Kaum Sofis. Dia dituduh merusak generasi muda, karena ilmu diberikan tanpa memandang kalangan dan kedudukan serta ilmu yang diberikan dianggap merusak kepercayaan orang Athena.

Menurut Socrates, keadilan merupakan tujuan politik yang layak, karena keadilan merupakan hal yang esensial bagi pemenuhan kecenderungan alamiah manusia. Keadilan adalah melaksanakan apa yang menjadi fungsi atau pekerjaan sendiri sebaik-baiknya tanpa mencampuri fungsi atau pekerjaan orang lain.

Ada beberapa pendapat Socrates yang berhubungan dengan pemerintahan, antara lain :

1. Suatu rezim atau masyarakat dikatakan adil, manakala setiap kelas yang ada melaksanakan pekerjaannya secara maksimal dan bekerja secara harmonis di bawah pengerahan filosof yang bijaksana,

Ada lima tipe rezim,

- a. Aristokrasi, merupakan tipe terbaik, karena yang memerintah seorang raja yang bijaksana,
- b. Timokrasi, rezim terbaik ke dua, rezim ini diperintah oleh mereka yang menyukai kehormatan dan kebanggaan, yaitu prajurit,
- c. Oligarchi, rezim yang diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kekayaan melimpah,
- d. Demokrasi, rezim yang dipimpin banyak orang yang hanya mengandalkan kebebasan atau keinginan yang tidak perlu,
- e. Tirani, rezim terburuk, yang memerintah adalah seorang tiran yang bertindak sewenang-wenang.

2. Ada tiga hal peninggalan Socrates di bidang pemerintahan :

- a. Mengkaji kenyataan melalui metode induksi,
- b. Doktrin atau ajaran yang dirumuskan bahwa kebenaran adalah ilmu,

- c. Adanya tertib intelektual dan moral yang dapat ditemukan oleh manusia.

Pada waktu Socrates berumur 70 tahun, dihukum mati oleh pemerintah. Dia lebih baik mati dalam keyakinan daripada mengorbankan keyakinan itu sendiri.

Socrates mati dibunuh dengan cara diracun oleh pemerintah. Dari sejarah Socrates ini kita dapat menarik pelajaran, bahwa seorang filsuf adalah seorang yang tetap mempertahankan prinsipnya dalam menjalankan kehidupan.

=====

RINGKASAN

Para filsuf Yunani Kuno menjadi rujukan dalam kita membahas filsafat pemerintahan. Awal mula dipelajari filsafat, pemikir Yunani Kuno mempersoalkan hakekat alam semesta, yakni mencari asal usul alam atau intisari alam. Seiring dengan kemajuan, cara berpikir masyarakatpun berkembang tidak lagi berkutat pada masalah rahasia alam, tetapi lebih terfokus pada masyarakat atau Negara. Ada beberapa filsuf yang terkenal sebelum Socrates, antara lain Thales, Anaximeners, Herakleitos, Demokritos yang mencari jawaban hakekat alam. Setelah itu muncul kaum Sofis yang merupakan pembaharu dalam pemikiran filsafat, di mana menurutnya kebenaran yang hakiki tidak pernah ada. Socrates sebagai salah satu filsuf yang terkenal dengan Ironi socratesnya memberikan pemahaman kepada kita bahwa ilmu dan ketertiban sosial merupakan keniscayaan yang pasti ada dalam penyelenggaraan pemerintahan.

EVALUASI

1. Jelaskan mengapa filsuf sebelum Socrates lebih mementingkan pembahasan masalah asal usul alam ?
2. Jelaskan beberapa faktor penyebab pola pikir masyarakat Yunani yang membahas masalah pemerintah dan masyarakat ?
3. Jelaskan beberapa filsuf sebelum Socrates berserta dengan pemikirannya ?
4. Jelaskan bagaimana metode yang dipakai Socrates dalam menyampaikan ilmunya ?
5. Jelaskan peninggalan Socrates di bidang pemerintahan ?

REFERENSI

1. Sudarsono, Ilmu Filsafat Suatu Pengantar, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
2. Noer, Deliar, Pemikiran Politik Di Negeri Barat, Rajawali, Jakarta, 1982
3. Syafiie, filsafat pemerintahan, Mencari bentuk Good Governance yang sebenarnya secara Universal, Perco, Jakarta, 2001.

B A B III

PLATO DAN ARISTOTELES

TUJUAN PEMBELAJARAN :

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mengerti dan memahami konsep pemikiran Plato dan Aristoteles di bidang Pemerintahan.

A. PLATO (429 – 347 SM)

A. 1. Sejarah kelahiran

Plato merupakan salah seorang filsuf terkenal di Yunani kuno, salah satu murid dari Socrates. Cara-cara yang dipakai Plato dalam memberikan ilmunya meniru cara berpikir Socrates. Plato lahir dari keluarga aristocrat Athena, ayahnya Ariston, raja yang bijaksana dalam memerintah Athena. Nama Plato yang sesungguhnya adalah “ Aristokles “, karena dahi dan bahunya yang lebar, dia mendapat julukan “ Plato “, yang berarti si lebar. Ia berniat terjun di bidang politik, namun karena kematian yang tragis dari gurunya, kemudian dia lebih suka hidup sebagai filosof. Ia tidak suka dan tidak setuju dengan cara-cara pemerintahan demokrasi, karena pemerintahan itulah yang menyebabkan gurunya mati.

Di samping itu, pada muda Plato, terjadi perang antara Athena dan Sparta yang dimenangkan oleh Sparta. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan Plato berpikir bagaimana mengembalikan kejayaan Athena.

A. 2. Pemikiran Plato di bidang Pemerintahan

Untuk mencari jawaban yang ada pada pikirannya, Plato kemudian pergi ke Mesir untuk belajar mencari pengalaman. Sekembali dari Mesir, di Athena Plato mendirikan sekolah yang diberi nama “ Akademi “. Menurut pandangannya, hanya lewat pendidikanlah Athena dapat kembali meraih kejayaannya. Baginya, orang yang

mempunyai pendidikanlah yang dapat memerintah, yang lebih diperjelas lagi adalah seorang filosof. Ilmu politik yang diberikan pada waktu itu belum terspesialisasi seperti sekarang, namun masih merupakan ilmu yang membahas masalah kemasyarakatan secara keseluruhan.

Untuk mendukung sekolahnya, Plato membuat buku yang diberi nama **Politeia (Republik)**. Buku ini sering diterjemahkan dengan Republik, yakni sebuah konstitusi dalam pengertian suatu jalan atau cara individu dalam berhubungan dengan masyarakat. Politeia ini juga disebut **Tentang Keadilan**, yakni bermakna kejujuran, moral dan sifat-sifat baik seseorang, kejujuran seseorang mengenai kesanggupan dan bakat dirinya. Keadilan menurut Plato berarti seseorang membatasi dirinya pada kerja dan tempat dalam hidup yang sesuai dengan panggilan kecakapan dan kesanggupannya. Keadilan terletak pada persesuaian dan keselarasan antara fungsi di lain pihak dan kecakapan serta kesanggupan di pihak lain.

Apabila dicermati, isi buku Politeia, memuat beberapa pembahasan sebagai berikut :

1. Metafisika, yang mencari dan membicarakan apa sebenarnya hakekat segala sesuatu,
2. Etika, yaitu tentang sikap yang benar dan baik, serta sebaliknya,
3. Pendidikan yang harus dijalani setiap orang sepanjang hidupnya,
4. Pemerintahan yang seharusnya, yang ideal.

Dalam menulis bukunya, Plato lebih mengemukakan peringatan dan suruhan dari pada mengadakan analisa keadaan atau kejadian. Hal ini terjadi karena menurut Plato kemunduran Athena disebabkan karena ketidaktahuan yang disertai kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri ini berpangkal pada sifat individualisme yang tidak dikendalikan, untuk itu perlu ada upaya untuk menyelaraskan kepentingan diri dengan kepentingan masyarakat. Dari sini dapat kita lihat bahwa Plato lebih menganjurkan kolektifisme. Penyesuaian diri ini dalam rangka mencapai tujuan bersama yakni tujuan yang ada, atau yang baik. Negara merupakan suatu organisme, di mana bagian-bagiannya mempunyai tujuan yang tidak saling berlawanan, melainkan bersesuaian satu sama lain. Plato menganalogikan antara jiwa dan Negara.

Unsur yang dipunyai jiwa, dijumpai pula pada Negara. Di dalam jiwa terdapat tiga unsure, yaitu **keinginan**, seperti lapar, dahaga, cinta; **logos (akal)** dengan jalan mana manusia dapat belajar mengetahui segala sesuatu dan karena mengetahui itu, mencintai pula; **semangat**, yang menyangkut soal kehormatan, dimana unsure ini mendorong orang untuk bertempur melawan ketidakadilan dan rasa tunduk pada keadilan. Sesuai dengan jiwa, maka dalam negarapun terdapat tiga kelas, yaitu **kelas penguasa**, yang mengetahui segala sesuatu, **kelas pejuang** atau pembantu penguasa yang mempunyai semangat dan **kelas pekerja** yang mempunyai nafsu atau keinginan. Adanya pembagian kelas ini, menurut Plato mereka bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan nan ada, yakni nan baik.

A. 3. Pandangan Plato tentang Kehidupan Sosial

Di dalam memandang kehidupan social, Plato melarang adanya hak milik dan kehidupan berfamili. Adanya milik, akan mengurangi dedikasi seseorang pada kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Kesempatan milik akan menggoda seseorang untuk memperhatikan kepentingannya sendiri; oleh karenanya, kepentingan jasmaniah seseorang dicukupi oleh Negara . Menurut Plato, famili tidak diakui dalam komunisme, hal ini bertujuan untuk menghindarkan bercampurnya urusan famili dengan urusan Negara. Kehidupan bersengama diatur dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas demi terwujudnya kejayaan Yunani. Ketentuan ini hanya berlaku untuk penguasa dan pembantu penguasa, sedangkan pekerja dibenarkan mempunyai milik dan keluarga, karena mereka yang menghidupi kelas yang lain. Namun Plato bukan berarti merendahkan terhadap wanita dan anak, karena ternyata wanita tetap diberi kesempatan untuk menjadi penguasa, dan bukan berarti menghilangkan kebahagiaan penguasa dan pembantu penguasa, karena baginya kebahagiaan terletak pada kewajiban atau fungsi masing-masing.

Plato memandang kedudukan manusia sebagai suatu ketentuan yang tidak dapat diubah lagi, walaupun pendidikan dapat menambah pengetahuan dan membentuk watak manusia, namun penambahan tadi dalam batas ketetapan yang telah ada, yaitu dalam rangka pembagian kelas tadi

Pendapat Plato yang terlalu idealis tersebut, ternyata tidak dapat dijumpai dalam kenyataan, karena pada hakekatnya manusia selalu melihat kompensasi terhadap pelaksanaan tugas. Menyadari pemikirannya yang tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan, akhirnya Plato membuat sebuah buku HUKUM (Nomoi), yang lebih mendasarkan pada kenyataan , dimana penguasa sebagai pengemban dan penjaga hokum. Hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengatur segala sendi kehidupan, dan pelaksanaannya lebih tergantung pada kesadaran manusia. Penguasa diberi kesempatan untuk mempunyai milik dan keluarga serta terpilihnya ditentukan oleh pilihan masyarakat.

B. ARISTOTELES (384 – 322 SM)

B. 1. Sejarah kelahiran

Aristoteles merupakan salah satu murid Plato yang lahir di Stagira, pada tahun 384 SM. Ketika berumur 18 tahun pergi ke Atena dan belajar pada Plato selama 20 tahun lamanya. Tulisan-tulisan Aristoteles meliputi banyak bidang, antara lain teologi, metafisika, logika, ekonomi dan fisika. Di dalam menguraikan pikirannya dia lebih melihat kenyataan dibandingkan dengan Plato.

B. 2. Pemikiran Aristoteles di bidang Pemerintahan

Aristoteles membuat sebuah buku yakni **POLITIK (Politica)** yang merupakan bahan kuliah di Lyceum. Dalam buku ini, Aristoteles memakai metode induksi, sehingga lebih melihat kenyataan. Metode ini diterapkan dengan jalan melakukan penelitian terhadap 158 konstitusi.

Negara dalam pandangan Aristoteles merupakan gabungan dari bagian-bagian, menurut urutannya, yaitu kampung, famili dan individu. Individu tidak dapat hidup sendiri tanpa bekerjasama dengan yang lain, sehingga terbentuklah keluarga, dan gabungan dari beberapa keluarga membentuk kampung. Gabungan kampung inilah yang kemudian membentuk Negara yang juga disebut sebagai masyarakat. Disinilah

membuktikan bahwa Aristoteles tidak membedakan masyarakat dengan Negara. Negara sebagai bentuk terakhir dari gabungan kampung merupakan bentuk yang sempurna, bentuk yang sebenar-benarnya yang sesuai dengan fitrah individu.

Aristoteles berpendirian bahwa manusia adalah makhluk politik (*zoon politicon*), artinya makhluk masyarakat, atau makhluk Negara, yang mencapai kesempurnaan hanya dalam masyarakat atau Negara. Orang yang tidak membutuhkan masyarakat disebut sebagai dewa atau bahkan seekor hewan. Fitrah manusia untuk bermasyarakat didasarkan pada rasa dan pikiran, yang merupakan syarat terbentuknya keluarga dan Negara. Negara mempunyai tujuan tertentu, yakni kesempurnaan hidup manusia.

B. 3. Pemikiran Aristoteles tentang Kehidupan Sosial

Berbeda dengan Plato, Aristoteles mengakui adanya kenyataan kehidupan berupa famili dan milik.

Ada dua penyebab, mengapa Aristoteles memandang milik dan keluarga menjadi suatu hal yang penting, yaitu :

1. Adanya milik memungkinkan seseorang untuk lebih mencurahkan perhatian kepada masalah-masalah umum. Milik memungkinkan orang mempunyai *Leisure*. *Leisure* dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah Negara dan masyarakat. Menurutnya hidup masyarakat sangat tergantung pada *leisure* tersebut. Sertanya seseorang dalam kehidupan negara sangat tergantung pada ada tidaknya milik. Pekerja yang terpaksa mencari nafkah sehari-hari tidak mungkin untuk memberikan perhatian kepada masalah masyarakat, sehingga golongan ini dimasukkan dalam golongan yang tidak mempunyai andil dalam Negara, mereka tidak dianggap sebagai warga Negara. Namun Aristoteles tidak menganjurkan untuk menumpuk-numpuk harta. Milik hanyalah sebagai alat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan memungkinkan mempunyai waktu senggang. Milik tidak dapat dijadikan tujuan, bentuk dan berat suatu alat ditentukan oleh fungsinya, dan bentuk dan berat yang berlebihan hanya akan mengurangi fungsinya. Milik

mempunyai fungsi social, yakni untuk kebaikan hidup masyarakat. Untuk itu barter sangat dianjurkan untuk menghindari upaya penumpukan harta. Milik yang berlebihan akan merusak manusia.

2. Milik dan keluarga merupakan salah satu sumber kebahagiaan. Kebahagiaan hanyalah mungkin di dapat apabila kita mempunyai harta benda.

B. 4. Pemikiran Aristoteles di bidang Pemerintahan

Sebagaimana Plato, Aristoteles dalam memandang Negara dan masyarakat masih bersifat teleologis, artinya ada tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berkaitan dengan tujuan Negara, Aristoteles juga berpandangan bahwa pendidikan bertujuan untuk membentuk watak dan tabiat manusia serta menambah kecakapan dan pengetahuan yang diperlukan dalam kehidupan bernegara.

Konstitusi yang ideal menurut Aristoteles adalah campuran oligarchi dan demokrasi, pemerintahan oleh orang-orang tertentu berdasarkan darah, harta atau keturunan tertentu dan dilaksanakan oleh orang banyak. Dasar social dari bentuk konstitusi ini adalah adanya kelas menengah yang luas, lebih luas dari kelas yang mewah, tetapi sebaliknya lebih luas dari pada kelas miskin. Fungsi Negara menurut Aristoteles dibagi dalam fungsi pembahasan, administrasi dan pengadilan. Hukum harus diletakkan di atas segalanya. Konstitusi hanya ada, manakala hokum ditegakkan secara adil. Seorang warga Negara yang berhak mendapatkan giliran untuk berkuasa adalah orang yang dapat menegakkan keadilan.

Aristoteles mengemukakan ada dua macam keadilan, yaitu :

1. Keadilan Penuh.

Keadilan penuh ini akan tercapai manakala orang mematuhi hokum yang berlaku. Keadilan ada apabila sikap dan tindak tanduk seseorang sesuai dengan hokum, dan karena hokum merupakan ikatan moral, maka keadilanpun merupakan kebajikan.

2. Keadilan dalam persamaan

Seorang yang adil adalah seorang yang tidak akan membiarkan dirinya mengambil sesuatu berlebih daripada yang diambil teman-temannya. Yang diambil adalah yang menjadi haknya, yang ada adalah persamaan seimbang, bukan persamaan mutlak. Keadilan akan terjaga manakala Negara menjaga keseimbangan pembagian itu berdasar pada sumbangan masing-masing warganegara.

=====

RINGKASAN

Dengan hadirnya Plato dalam sejarah filsafat Yunani Kuno, maka masyarakat sudah mulia memikirkan kehidupan Negara. Di dalam menguraikan pendapatnya, Plato masih berkiblat pada pendapat gurunya Socrates. Dalam kehidupan sosial Plato melarang adanya kehidupan famili dan milik bagi penguasa dan pembantu penguasa, karena baginya kebahagiaan terletak pada penunaian kewajiban. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada pembagian kelas, yakni kelas penguasa, pembantu penguasa dan kelas pekerja yang masing-masing bekerja sesuai dengan fungsinya. Aristoteles sebagai penerus Plato tidak sependapat dengan gurunya di dalam memandang kehidupan sosial, baginya milik dan keluarga merupakan suatu hal yang wajar, karena kenyataan menunjukkan bahwa setiap orang akan mengharapkan kompensasi dari setiap apa yang dilakukan. Aristoteles memandang ada keadilan penuh dan keadilan yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan.

EVALUASI

1. Jelaskan pendapat Plato tentang kehidupan Sosial ?
2. Jelaskan bagaimana pendapat plato tentang keadilan ?

3. Jelaskan bagaimana pendapat Aristoteles tentang kehidupan sosial ?
4. Jelaskan konsep keadilan menurut Aristoteles ?

REFERENSI

1. Noer, Deliar, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Rajawali, Jakarta, 1982
2. Syafiie, *Filsafat Pemerintahan, Mencari bentuk Good Dovernance yang sebenarnya secara Universal*, Perco, Jakarta, 2001
3. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988

B A B IV

FILSAFAT ABAD PERTENGAHAN

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mengerti dan memahami bagaimana pemikiran filosof pada abad pertengahan.

A CIRI- CIRI ABAD PERTENGAHAN

Setelah Aristoteles berakhir, pemikiran filsafat berkembang tidak lagi membicarakan persoalan yang sebatas polis atau Negara kota, namun karena orang sudah berhadapan dengan dunia luas, maka mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Pemikiran sudah dimulai bahwa Negara merupakan satu kesatuan dengan hukum, dimulai dari Rumawi. Pemikir Rumawi berpendapat bahwa Negara sebagai satu kesatuan masyarakat, diciptakan oleh hukum, suatu bentuk perjanjian di mana hak-hak masing-masing yang berjanji menjadi masalah pokok. Menurut Cicero, hubungan manusia bersandar pada hukum. Warga Rumawi merupakan sewarga karena diikat oleh hukum Romawi. Namun ada hukum yang mengikat seluruh manusia di dunia, yaitu hukum alam, di mana dengan hukum ini manusia mempunyai ikatan sesamanya yang membentuk masyarakat dunia. Hukum ini berlaku apabila ada kesadaran manusia tentang hukum itu sendiri dan dengan pengetahuannya. Dalam teorinya, hukum tersebut berlaku untuk semuanya, artinya manusia mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, namun prakteknya tetap dijumpai bahwa penguasa bersifat mutlak dan bertindak sewenang-wenang.

Di samping hukum alam tersebut, ada hukum positif yang datangnya berasal dari Tuhan maupun dari penguasa. Adanya dua hukum yang berbeda tersebut, menimbulkan pertentangan dalam masyarakat dalam memandang siapa penguasa di

dunia, mereka mempertanyakan siapakah penguasa di dunia itu, raja atau kepala agama. Munculnya masalah dua kekuasaan tersebut disebabkan adanya pembatasan lingkup kekuasaan sekuler di satu pihak dan kekuasaan spiritual di pihak lain, sementara itu manusia harus tunduk pada kedua penguasa tersebut.

Dalam perkembangannya, agama Kristen mengalami perubahan dalam memandang kaisar atau raja. Penguasa harus menyesuaikan diri dengan agama yang dianut masyarakatnya, sehingga dengan demikian dalam hal kerohanian sebenarnya tunduk kepada agama. Dalam hal dunia, rajalah yang berkuasa, dan kepala agama harus tunduk kepadanya. Disinilah kemudian muncul istilah “ dua pedang atau dua kekuasaan”. Namun dalam prakteknya, ternyata pemisahan yang demikian tidak dapat berjalan dengan baik, masing- masing merasa apa yang dilakukan menjadi lingkup kekuasaannya.

Ada beberapa ciri yang menonjol di abad pertengahan ini, yaitu :

1. Adanya feodalisme

Di bidang ekonomi dan politik yang terjadi adalah adanya kesatuan ekonomi dan politik yang bersifat kecil-kecil. Feodalisme merupakan system pemerintahan di mana seorang pemimpin yang biasanya seorang bangsawan, mempunyai anak buah banyak yang lebih rendah tingkatannya, yang disebut *Vazal*. Vazal ini harus memberi upeti kepada bangsawan yang lebih tinggi tingkatannya. Sedangkan vazal sendiri mempunyai anak buah dan abdi yang akan memberi upeti kepada mereka, Jadi dalam feodalisme ini terbentuk seperti piramida. Perbudakan menjadi suatu hal yang biasa, budak sangat sulit melepaskan diri dari, sehingga penindasan terjadi dimana-mana. Karena kekacauan sering terjadi, maka si kecil menggantungkan nasib keamanannya kepada penguasa. Agar keamanan terjamin, orang yang mempunyai tanah sempit lebih baik menjual kepada penguasa, sehingga ia akan menjadi buruh dengan tanpa kewajiban memberi upeti.

2 . Adanya Gilde

Gilde merupakan perkumpulan-perkumpulan produsen untuk melindungi diri dari tindakan raja feodal yang memberatkan dan untuk mencapai tujuan bersama.

Gilde ada dua macam, yaitu gilde tukang, yakni perkumpulan kaum produsen sebagai tukang dan gilde dagang, yakni perkumpulan kaum perantara atau kaum pedagang. Dalam melakukan kegiatannya, gilde dipimpin oleh kepala gilde yang mengatur kerjasama tukang-tukang dan anggotanya dalam memproduksi barang-barang. Pertukangan pada umumnya dilakukan bukan untuk melempar barang di pasaran, melainkan berdasarkan pesanan. Gilde menentukan seseorang dapat disebut pengrajin atau tukang. Untuk memperoleh gelar tersebut, seseorang harus magang terlebih dahulu dengan pengrajin atau tukang ahli, tanpa memperoleh imbalan, hasil kerjanya merupakan uang pendidikan yang harus dibayar dan merupakan penghisapan dalam gilde. Dengan ketentuan yang demikian, tidak semua orang dapat masuk dalam pertukangan. Anggota gilde tentunya juga menjaga agar pasaran mereka tidak dipersempit dengan munculnya tukang-tukang baru, sehingga kungkungan terhadap calon tukang itu yang sangat terasa. Kepala gilde mengangkat dirinya sebagai majikan yang menentukan pembagian kerja, metode kerja dan sasaran kerja, yang akhirnya menimbulkan spesialisasi pekerjaan. Anggota gilde yang lemah, akhirnya lebih memilih menjadi buruh gilde. Konsep yang demikian melahirkan embrio adanya buruh dan majikan.

3. Skolastik

Skolastik adalah suatu paham dimana orang lebih percaya dan menggantungkan pendapat yang dikemukakan oleh otoritas dalam keyakinan atau agama. Injil merupakan kitab yang hanya dapat dibaca oleh pejabat gereja, karena bahasanya tidak dimengerti oleh masyarakat kebanyakan, interpretasi yang diberikan harus berasal dari gereja. Di dalam ilmu pengetahuan pun merupakan monopoli pihak gereja, sehingga tidak bisa berkembang. Orang yang mengadakan penelitian dan menyimpulkan berbeda dengan gereja, akan memperoleh kecaman. Dari sini dapat disimpulkan bahwa di bidang peradaban, pemikiran dan kebudayaan mengalami kemunduran di bandingkan jaman Yunani Kuno dan Romawi.

B. IBNU KHALDUN (1332 – 1406)

Abu Zaid Abdurrahman Ibn Khaldun atau disingkat Ibnu Khaldun lahir di Tunis tahun 1332. Ibnu Khaldun merupakan seorang ilmuwan dan seorang praktisi. Kitabnya yang terkenal adalah **Muqaddimah**, yang merupakan pengantar kitab yang lebih luas, yaitu **Kitab al Ibar** (Kitab Ibarat-ibarat).

Dalam menulis bukunya Ibnu Khaldun lebih melihat kenyataan dan berdasarkan apa yang dialaminya. Ia melihat ikatan bermasyarakat dan bernegara dan peradaban pada umumnya sebagai sesuatu yang tumbuh dan tenggelam terlepas dari soal apakah agama datang atau tidak, baginya masyarakat, Negara dan peradaban tidak tergantung pada agama. Sikap hidupnya sebagai seorang muslim tidak mempengaruhi dalam mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

Ibnu Khaldun merupakan seorang filsuf yang mulai membedakan antara masyarakat dan Negara. Berhubung dengan tabiat dan fitrah kejadiannya, manusia memerlukan masyarakat, sehingga perlu bekerjasama untuk dapat hidup, baik untuk mencukupi kebutuhan maupun bertahan hidup. Namun manusia mempunyai sifat kehewanan, sehingga diperlukan **wazi** yang mempunyai kewibawaaan dan kekuasaan (**mulk**). Kerjasama yang demikian didasarkan hasil pemikiran. Masyarakat yang mempunyai wazi yang disertai **mulk** itulah yang disebut Negara.

Ada beberapa ciri dari Negara, yaitu :

1. Harus mempunyai peradaban,
2. Harus menetap,
3. Mempunyai kekuasaan yang dapat memaksakan kehendaknya,
4. Harus memiliki rasa Ashabiyah, rasa golongan.

Rasa golongan atau ashabiyah, merupakan syarat mutlak bagi Negara, baginya rasa ashabiyah ini dapat berasal dari darah, turunan dan hubungan yang akrab.

Rasa ashabiyah mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

1. Sebagai alat perjuangan,
2. Sebagai alat bertahan dan menyerang,

3. Sebagai alat penyelesaian konflik, apabila harus diselesaikan dengan kekerasan.

Dalam masyarakat menetap, tujuan terakhir dari *ashabiyah* adalah *mulk*, kekuasaan *wibawa*. Rasa *ashabiyah* kuat pada permulaan perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan, dan akan melemah setelah kekuasaan tercapai, hal ini disebabkan penguasa akan mulai melihat adanya sesuatu yang menarik dari kekuasaan, yakni kemewahan, karena pada dasarnya kekuasaan selalu diiringi kemewahan. Namun sebenarnya kemewahan ini hanya mula-mula saja memberi kekuatan kepada penguasa, karena kekuasaan mempunyai sifat merusak akhlak penguasa. Penguasa akan melupakan kewajibannya dan mendasarkan kekuasaannya pada serdadu upahan, yang pada akhirnya akan terjadi kekerasan untuk memaksakan kehendak.

Kehidupan Negara menurut Ibnu Khaldun mengikuti perkembangan hidup organisme, yaitu tumbuh, megah dan jaya, kemudian menua dan akhirnya hancur atau mati.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang kepala Negara, yaitu :

1. Harus berpengetahuan disertai kesanggupan untuk mengambil keputusan sesuai dengan syariah,
2. Harus *adalah* artinya bersikap jujur, berpegang teguh pada keadilan, moral yang baik, sehingga kata-katanya dapat dipegang, ucapannya dapat dipercaya,
3. Mempunyai kesanggupan dalam menjalankan tugas-tugas yang dituntut padanya sebagai kepala Negara, termasuk melaksanakan hokum secara konsekuen,
4. Secara fisik dan mental harus bebas dari cacat yang tidak memungkinkan menjalankan tugasnya sebagai kepala Negara,
5. Harus lemah lembut dan sopan santun terhadap pengikutnya, membelanya dan mengutamakan kepentingan pengikutnya.

Ibnu Khaldun tidak membedakan pengertian khalifah dan imamah. Khalifah juga disebut sebagai imamah, dikepalai seorang imam. Lembaga khilafah atau imamah ini

menjaga agar ajaran Nabi tegak, jadi lembaga ini bersandar syariah Syariah diperlukan untuk mencegah keburukan yang ditimbulkan dari kekuasaan.

Asyabiyah yang disertai agama akan menjadi lebih kuat, sehingga golongan yang bersangkutan akan semakin bersatu. Demikian pula sebaliknya, gerakan agama tidak akan berhasil dengan baik, kalau tanpa pengikut yang banyak yang mempunyai rasa bersatu berdasarkan ashabiyah tersebut

Ibnu Khaldun memandang sipil dan militer sebagai pena dan pedang dalam Negara yang mempunyai kedudukan berbeda. Dalam keadaan kurang aman, misalnya terjadi gangguan kekerasan, maka militerlah yang harus banyak memegang peranan, sebaliknya apabila Negara dalam keadaan damai, maka sipil yang harus berperan lebih besar. Menurutnya ada pengaruh ekonomi terhadap politik. Neraca yang seimbang adalah factor yang sangat penting dalam mewujudkan stabilitas politik. Perangsang yang menguntungkan rakyat secara materiil merupakan hal yang penting, agar rakyat dapat berusaha lebih giat dalam produksi, sehingga Negara juga diuntungkan. Tetapi bila pajak yang diberlakukan memberatkan rakyat, maka akan mengurangi kekuatan Negara. Kehancuran Negara akan terjadi manakala pajak yang berat dibebankan kepada rakyat dan diiringi kehidupan mewah dari penguasa

C. MACHIAVELLI (1469 – 1527)

Machiavelli lahir pada tahun 1469. ketika berumur 25 tahun ia telah mulai memasuki dunia politik dan pernah menjadi diplomat. Tahun 1512 ia kehilangan pekerjaannya karena pergantian penguasa. Setahun kemudian dia terlibat dalam komplotan anti pemerintah, yang kemudian dipenjara. Pada tahun 1527 dia meninggal dunia dan mengalami kekecewaan karena tidak dapat lagi terjun ke dunia politik.

Keadaan pada saat Machiavelli dilahirkan sedang terjadi masa renesance dan reformasi. Renesans menunjukkan pada pembaharuan yang timbul terutama di lapangan kebudayaan, yang tidak mau mengikat lagi pada aturan gereja dan tradisi serta ingin menyatakan kebebasan dan kemauan untuk maju. Manusia renesans mempunyai dua sifat yang bertolak belakang, karena di satu pihak memuja masa lama

yang dianggap jaya, dan di lain pihak penuh harapan pada masa yang akan datang yang ingin dibangunnya kembali.

Reformasi adalah pembaharuan dalam agama Kristen, reformasi hendak membersihkan agama dan gereja dari anasir-anasir tambahan yang dipercayai telah menyelinap ke dalam ajaran agama. Injil mulai diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti orang banyak, dan hubungan dengan Tuhan dipercayai secara langsung, tanpa perantara pendeta. Manusia renesans telah melepaskan diri dari kungkungan gereja dan paham skolastik dan pemikiran lebih disandarkan pada akal. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari Islam yang telah menyebar terutama ke universitas-universitas di Eropa. Namun abad ini ditandai dengan merajalelanya peperangan, moral diabaikan, pengkhianatan dalam berkawan dan saling curiga di antara masyarakat. Melihat keadaan yang demikian, Machiavelli kemudian membuat buku yang isinya dipandang oleh beberapa kalangan sebagai buku yang penuh dengan ajaran tanpa moralnya, sehingga Machiavelli terkenal sebagai filosof yang mengajarkan ajaran tanpa moral. Dia berpendapat bahwa dalam praktek kekuasaan yang nyata, tidak ada hubungan antara kekuasaan tersebut dengan etika pemerintahan, karena adanya Negara bagi dia bersifat sekuler, termasuk di dalamnya berbagai cara perebutan kekuasaan, sedangkan etika berkaitan dengan norma yang berkaitan dengan peraturan Tuhan yang transedental sifatnya, karena berorientasi dengan dunia gaib.

Buku yang dihasilkan Machiavelli adalah ***Il Principe*** (Pangeran atau Kepala Negara) dan ***Discorsi*** (Uraian).

Isi dari buku Il Principe adalah :

1. Penguasa yang disanjung adalah orang yang sanggup memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dan kemasyhuran, lepas dari cara-cara yang digunakan,
2. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah berhubungan dengan kehidupan dunia, yakni kemasyhuran, kemegahan dan kekuasaan,

3. Menolak adanya hokum alam, bahkan kepatuhan pada hokum tersebut bergantung pada soal apakah kepatuhan itu berhubungan dengan kemegahan, kemasyhuran dan kekuasaan atau tidak,
4. Untuk suksesnya seseorang, kalau perlu penipuan dibenarkan,
5. Agama diperlukan sebagai alat kepatuhan, bukan karena nilai-nilai yang dikandung di dalamnya,
6. Dalam berjanji berbuat seolah-olah mengikatkan diri pada janji tersebut, walaupun batin menolak,
7. Seorang penguasa berbuatlah sebagai kancil pada suatu waktu dan sebagai singa pada waktu yang lain.

Walaupun Machiavelli menyarankan penguasa untuk menghalalkan segala cara, namun sebenarnya anjuran itu hanya untuk kebesaran Negara Itali. Kemegahan, kebesaran dan kekuasaan seseorang disamakan dengan kemegahan, kebesaran dan kekuasaan Negara. Persatuan wilayah Itali terlalu dilihat pada tangan besi penguasa, pada ketakutan terhadap tangan besi ini, bukan pada rasa golongan sebagaimana Ibnu Khaldun sarankan. Machiavelli sebenarnya mengemukakan pendapat itu khusus untuk negara yang telah korup, yang tidak mungkin naik lagi kecuali dengan kemauan, ketabahan dan ketekunan serta kelihaian seorang pemimpin

Isi buku Discorsi (Uraian) :

1. Sangat menjunjung tinggi rakyat, karena pada Negara republic, yang rakyatnya tidak korup, dapat memerintah diri sendiri,
2. Suara rakyat adalah suara Tuhan, pendapat umum lebih berharga dari pendapat pribadi,
3. Pengangkatan penguasa diserahkan kepada rakyat, kemajauan suatu Negara lebih terjamin dengan pemerintahan rakyat,
4. Dalam republic, kebebasan terjaga,
5. Kepatuhan pada hokum dilakukan dengan spontan, tanpa paksaan apapun,
6. Kebebasan dan kemerdekaan tidak tergantung pada persoalan siapa yang memerintah, melainkan pada rasa bebas warga Negara dalam bertindak.

Negara akan rusak menurut Machiavelli apabila banyak orang kaya yang hidup bermalas malasan , sehingga tidak ada usaha untuk mencari nafkah dan orang tersebut berkuasa atas orang lain.. Negara yang penuh orang seperti ini dapat bangkit kembali hanya oleh penguasa yang bertangan besi. Berbicara masalah hokum Machiavelli mengatakan bahwa ketenangan dan kedamaian dapat dicapai dengan hokum dan kekerasan. Hukum adalah untuk manusia, tetapi keadaan menunjukkan bahwa hokum saja tidak cukup, sehingga perlu kekerasan, yang sebenarnya ini hanya untuk hewan.

=====

RINGKASAN

Ciri yang melekat pada abad pertengahan disebabkan adanya keadaan yang penuh kekacauan dan menimbulkan masa renesans dan reformasi. Negara dipandang sebagai satu masyarakat yang diciptakan oleh hokum. Walaupun hokum sudah ada, namun kenyataan masih menunjukkan bahwa penguasa tetap bertindak sewenang-wenang. Masa pertengahan yang diliputi feodalisme, gilde dan skolastik membuat Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ikatan bernegara membutuhkan rasa ashabiyah yang disertai syariah. Syariah diperlukan untuk mencegah keburukan yang ditimbulkan dari kekuasaan. Melengkapi filsof abad pertengahan, Machiavelli muncul dengan ajaran tanpa moralnya. Ajaran ini sebenarnya ditujukan kepada Negara yang sudah korup seperti Itali sebagaimana di lihat, di mana untuk membangkitkan kejayaan Itali perlu ada penguasa yang bertangan besi. Baginya kekuasaan tidak ada hubungan dengan etika pemerintahan, sehingga penguasa bebas melakukan apa saja demi tercapainya sebuah kekuasaan yang menjadi nilai hidup yang dianggap tinggi.

EVALUASI

1. Jelaskan beberapa ciri abad pertengahan,?

2. Jelaskan pendapat Ibnu Khaldun tentang Ashabiyah,?
3. Jelaskan syarat-syarat Kepala Negara menurut Ibnu Khaldun ?
4. Jelaskan isi buku Pangeran dari Machiavelli?
5. Jelaskan isi buku Uraian dari Machiavelli ?

REFERENSI

- 1 Wukirsari, Niccolo Machiavelli, *Il Principe Sang Penguasa*, PT.Gramedia, Jakarta,1986
- 2 Noer, Deliar, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Rajawali,Jakarta, 1982
- 3 Syafiie, *Filsafat Pemerintahan, Mencari bentuk Good Governance yang sebenarnya secara Universal*, PT Perco, Jakarta , 2001.

B A B V

THOMAS HOBBS

TUJUAN PEMBELAJARAN :

Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami pemikiran Thomas Hobbes dalam membahas pemerintahan.

A. SEJARAH KELAHIRAN THOMAS HOBBS

Thomas Hobbes dilahirkan di Malmesbury Inggris tahun 1588 Dan meninggal dunia tahun 1679 dalam usia 91 tahun. Pada waktu kelahirannya, terjadi serangan Spanyol ke Inggris serta berbagai pertentangan dalam kehidupan agama dan politik. Karya yang terkenal dari Thomas Hobbes adalah *De Decive* (Kewarganegaraan) dan *Leviathan*. Atau *Commonwealth*. Thomas Hobbes merupakan seorang pemikir politik di mana kekerasan, kekejaman, dendam dan ketakutan akibat perang agama dan perang sipil di Inggris ikut mewarnai kehidupannya. Thomas Hobbes dilahirkan premature akibat ketakutan yang ditimbulkan oleh perang antara Spanyol dan Inggris Thomas Hobbes dibesarkan dan memperoleh pendidikan dari pamannya yang kaya, karena bapaknya seorang pendeta yang miskin. Dari pendidikan yang diperolehnya, Thomas Hobbes banyak mempelajari pemikiran Aristoteles. Adanya peperangan yang terjadi membuat Thomas Hobbes berpikir bagaimana perang dan konflik bisa dihindari dan perdamaian tercipta secara hakiki. Dari fenomena tersebut, Thomas Hobbes mengambil dua kesimpulan yang penting, yakni :

1. Salah satu penyebab terjadinya perang agama, perang sipil dan konflik social adalah karena lemahnya kekuasaan Negara. Kekuasaan Negara terbelah menjadi dua. Di Inggris, misalnya kekuasaan Negara terbelah menjadi dua, yakni kekuasaan raja dan parlemen.
2. Perang akan dapat dihindari dan perdamaian akan tercipta apabila kekuasaan Negara mutlak, tidak terbagi-bagi.

Dua persoalan tersebut oleh Thomas Hobbes dicari jalan keluarnya, namun dia terkejut melihat kenyataan yang ada tentang terjadinya perang sipil dan agama. Di satu pihak dia melihat raja maupun kaum agama menegaskan bahwa perjuangan mereka didasarkan pada norma dan nilai agama yang luhur. Namun kenyataan menunjukkan sebaliknya. Golongan agama muncul sebagai actor politik yang bengis dan kejam, sehingga kebencian dan balas dendam menjadi sesuatu yang saling mengancam. Menurut Thomas Hobbes, masyarakat hanya bisa ditata dalam perdamaian apabila pengaruh emosi dan nafsu tidak lagi menjadi dasar dalam diri manusia.

B. KARYA THOMAS HOBBS

Thomas Hobbes menghasilkan karya yang disebut LEVIATHAN, diartikan sebagai sebuah Negara yang memiliki kekuasaan mutlak dan tidak dapat dikritik siapapun, sehingga menimbulkan rasa takut bagi siapapun yang melanggar aturan Negara, karena hukuman yang dijatuhkan sangat berat. Apabila Negara lemah, akan terjadi perpecahan dan Negara akan terpecah belah. Menurut Thomas Hobbes keadaan alamiah manusia adalah ingin mempertahankan kebebasannya dan menguasai orang lain, sehingga selalu bertindak menurut emosi dan nafsu yang paling kuat. Secara keseluruhan kelakuan manusia bersumber pada ketakutan akan kematian dan naluri mempertahankan kehidupannya.

Negara berasal dari perjanjian bebas individu yang sebelumnya belum bermasyarakat. Perjanjian yang terjadi adalah sesama individu bukan dengan Negara, sehingga Negara sendiri bebas, tidak terikat pada perjanjian, Negara bebas melakukan kehendaknya walaupun bertentangan dengan kehendak individu. Orang yang melakukan perjanjian tersebut disebut Commonwealth. Menurut Thomas Hobbes, moral tidak perlu ada dalam kehidupan

Thomas Hobbes mempunyai pemikiran tentang manusia dan perilakunya dalam kehidupan bernegara. Ada beberapa pandangan tentang manusia dari Thomas Hobbes, yaitu :

1. Manusia adalah pusat dari persoalan sosial dan politik,
2. Manusia tidak dapat didekati dengan pendekatan normatif religius, karena akan menjaga jarak dengan realitas sosial,
3. Manusia harus didekati sebagai alat mekanik, sehingga menggunakan pendekatan matematis geometric.
4. Dengan memiliki akal, manusia mempunyai kemampuan untuk melakukan refleksi, berkalkulasi dan diperintah oleh sejumlah pendapat, apabila hanya mempunyai instink, dapat dipastikan akan saling menghancurkan.
5. Kekuatan akal dan naluri sama kuatnya dalam mengendalikan perilaku manusia, sehingga dalam keadaan alamiah manusia adalah setara, bertindak semata-mata hanya mengikuti nafsu saja,
6. Sifat alamiah pada manusia melahirkan persaingan sesama untuk memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalisir penderitaan; mereka yang kalah akan tersingkir dan yang menang akan berkuasa.. Untuk memenangkan persaingan kekerasan sangat dimungkinkan, sehingga manusia akan menjadi serigala bagi yang lain.

Persaingan yang terjadi diantara manusia akan menjadi semakin meruncing, disebabkan beberapa hal, antara lain :

1. Kecenderungan alamiah manusia adalah meraih kebesaran dirinya sendiri. Kebesaran diri adalah bentuk kebahagiaan yang tertinggi. Manusia biasanya suka disanjung dan marah apabila harga dirinya direndahkan,
2. Adanya konsep kesetaraan manusia. Tidak ada manusia yang lebih kuat dari manusia yang lainnya, yang berarti kelemahan manusia X sama dengan kelemahan manusia Y. Dalam keadaan alamiah tidak ada manusia yang paling kuat atau yang paling lemah, sehingga manusia yang paling kuat sekalipun akan menjadi rentan terhadap serangan orang lain Manusia pada dasarnya memiliki rasa ketakutan atau kecemasan luar biasa sepanjang hidupnya terhadap manusia lain. Kesadaran ini menyebabkan manusia melakukan

berbagai macam antisipasi, antara lain dengan melakukan penyerangan terlebih dahulu.

3. Faktor agama. Menurut pandangan Thomas Hobbes, agama dapat merupakan sumber konflik yang potensial dan pemicu ketegangan social.. Hal ini didasarkan adanya sikap militansi atau fanatisme yang melekat pada ajaran agama, sehingga orang rela mati demi membela agama.

C. ISI BUKU LEVIATHAN

Leviathan merupakan salah satu karya terkenal dari Thomas Hobbes, yang diartikan sebagai sebuah negara yang memiliki kekuasaan mutlak, sehingga tidak bisa dikritik oleh siapapun. Kekuatan yang demikian dapat menyebabkan ketakutan untuk melanggar peraturan negara. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan dapat berupa hukuman mati. Negara seperti ini haruslah kuat, karena kalau tidak akan menimbulkan anarkhi, sehingga masyarakat akan pecah yang dapat mengakibatkan negara juga terpecah belah. Argumnetasi yang mengatakan negara harus kuat dan mempunyai kekuasaan mutlak adalah supaya tercipta perdamaian dan terhindar dari perang saudara.

Negara berasal dari suatu perjanjian bebas individu-individu yang sebelum perjanjian itu belum bermasyarakat. Karena individu tidak dapat sendirian menyelesaikan masalahnya, maka sebagai orang bebas dan sama kedudukannya mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu tatanan politik, dengan hak dan kewajiban tertentu dan wewenang tertinggi yang ditetapkan dengan cara yang disetujui bersama. Perjanjian tersebut adalah perjanjian antar individu, bukan dengan negara, sehingga kedudukan negara adalah bebas, tidak terikat pada perjanjian tersebut. Negara bebas melakukan apapun yang dikehendakinya, terlepas apakah sesuai atau tidak dengan kehendak individu. Gerombolan atau persekutuan masyarakat tersebut disebut *Commonwealth* atau *Leviathan*. Moralitas dalam pandangan Thomas Hobbes dianggap sebagai sesuatu yang tidak diperlukan. Walaupun kekuasaan negara mutlak, namun ada satu hal yang tidak boleh

dilakukannya atau rakyat boleh menolaknya, yakni apabila penguasa memerintahkan kepada rakyatnya sesuatu yang akan menyakiti jasmaniahnya.

D. ISI BUKU LEVIATHAN

Thomas Hobbes memandang keadaan sebelum bernegara merupakan keadaan alamiah, yakni keadaan dimana manusia dapat bebas melakukan apa saja yang menjadi kehendaknya sesuai dengan nalurinya.. Namun naluri ini berbeda dengan hewan, karena hewan dengan nalurinya itu dapat melakukan kerjasama, jadi berwatak social. Manusia dengan nalurinya mendorong seseorang untuk berkompetisi atau berperang dalam meraih kebesarannya dan hak-hak istimewanya. Watak yang demikian menyebabkan manusia berperang satu dengan yang lain. Kondisi yang demikian membuat manusia mencari alternatif kehidupan lain yang terbaik, yakni membentuk sebuah negara. Keinginan bertahan hidup dan menghindari kematian merupakan motivasi lain yang mendorong manusia untuk meninggalkan keadaan alamiah dan membentuk masyarakat politik. Pada saat seperti inilah akal lebih berperan untuk menyelamatkan dirinya, karena dalam keadaan alamiah manusia saling membunuh, sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun juga. Penalaran mengajarkan manusia sebaiknya hidup damai di bawah kekuasaan negara dan hukum daripada hidup dalam keadaan bebas sebebas-bebasnya tetapi anarkhi dan berbahaya bagi keselamatan manusia.

Terbentuknya sebuah negara atau kedaulatan pada hakekatnya adalah sebuah Kontrak social atau ***Covenant***. Dalam kontrak tersebut manusia atau individu secara sukarela menyerahkan hak serta kebebasannya kepada seorang penguasa negara atau dewan rakyat. Negara yang sudah terbentuk memiliki hak dan nilai-nilai moralitas yang dapat menentukan baik dan buruk suatu norma atau sistem nilai dalam masyarakat. Negara mempunyai hak memutuskan perkara yang disengketakan., sehingga berperan sebagai hakim tertinggi. Kekuasaan negara menentukan apakah seseorang boleh menguasai asset maupun sumber-sumber ekonomi atau tidak. Hak yang dimiliki atas kekayaan dapat disita oleh negara setiap

saat bila negara menghendakinya. Untuk pengangkatan jabatan politis, baik dalam pemerintahan sipil maupun militer sepenuhnya tergantung kepada hak prerogratif penguasa negara. Kewenangan negara yang sangat mutlak menyebabkan tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk naik banding atas keputusan yang tidak memuaskan dirinya. Kewenangan yang mutlak ini merupakan harga yang harus dibayar manusia agar ia dapat hidup dalam ketentraman, keteraturan dan kedamaian.

Negara adalah lembaga politik yang hanya mengenal hak, tetapi tidak mengenal kewajiban tersebut. Penguasa diberikan hak untuk melakukan apa saja demi kepentingan negara. Negara memiliki fungsi sebagai alat kekerasan yang dilembagakan dan berhak memaksa rakyat untuk patuh pada aturan yang telah digariskannya. Dalam menjalankan kekuasaannya tidak boleh ada yang terpecah. Kekuasaan yang terbelah menyebabkan timbulnya anarkhi kekuasaan dan terjadi perang sipil ataupun perang antar agama dalam suatu negara. Walaupun Thomas hobbes berpendapat bahwa kekuasaan yang mutlak dapat menyebabkan negara despotis, namun negara yang demikian lebih baik daripada terjadinya anarkhi akibat terpecahnya kekuasaannya.

Namun Thomas Hobbes berpendapat bahwa kemutlakan wewenang negara bukan berarti negara tidak berkepentingan untuk membuat undang-undang yang baik. Menurutny undang-undang yang baik tidak sama dengan undang-undang yang adil. Setiap undang-undang dengan sendirinya sudah adil, karena apa yang dimaksud dengan adil justru didefinisikan dalam undang-undang. Adil berarti sesuai dengan undang-undang. Negara tidak dapat melanggar keadilan. Undang-undang yang baik berarti undang-undang yang demi kesejahteraan rakyat dan harus jelas. Namun persoalan yang muncul adalah bahwa undang-undang yang baik dapat saja diharapkan, tetapi tidak dapat dituntut oleh rakyat, karena rakyat tidak berhak untuk menuntut apa-apa dari negara dan penguasa. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah undang-undang yang baik pembuatannya seluruhnya tergantung dari kesadaran penguasa, sementara penguasa sangat mutlak kekuasaannya, sehingga

tidak mustahil akan menyelewengkannya ?. Menurut Thomas Hobbes ada dua cara untuk dapat menghalangi kesewenangan penguasa, yaitu kesadaran penguasa itu sendiri dan hak alamiah setiap orang untuk melindungi dirinya sendiri, yaitu dengan mematuhi dan taat pada hukum. Tetapi apabila negara tetap menindas dan mengancam masyarakat yang taat pada hukum, mereka tidak punya alasan apapun lagi untuk mentaati negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika negara sudah mulai bertindak sewenang-wenang, maka perjanjian negara akan ambruk dan masyarakat kembali ke dalam keadaan alamiah semula. Thomas Hobbes tidak secara jelas mengemukakan pendapatnya tentang negara ideal. Bagi dia semua bentuk negara baik, asal saja kekuasaan dalam negara tidak dibagi-bagikan, kekuasaan negara harus mutlak. Thomas Hobbes tidak setuju terhadap gagasan majelis rakyat. Menurutnya demokrasi menimbulkan pluralisme politik, termasuk dalam pengertian adanya berbagai pusat kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki negara menjadi tidak solid, yang merupakan cikal bakal terjadinya konflik kekuasaan. Monarkhi absolute dengan seorang penguasa adalah bentuk negara yang paling baik, karena dengan seorang penguasa bisa tetap konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, sedangkan negara yang dikuasai oleh sebuah dewan besar kemungkinan keputusan negara akan mudah berubah.

Adanya kekuasaan negara di tangan seorang penguasa saja dapat menjamin bahwa segala rahasia negara akan terjaga dibandingkan dengan negara yang dikuasai dewan. Penguasaan negara yang didominasi oleh dewan rakyat dapat menimbulkan disintegrasi. Keretakan yang terjadi dalam hubungan antar anggota dewan rakyat dapat mengakibatkan terjadinya polarisasi kekuatan negara, sehingga akan merusak keutuhan dan kedaulatan sebuah negara. Pengambilan keputusan di dewan juga akan berlangsung lama, karena masing-masing anggota merasa membela rakyat, kondisi yang demikian menyebabkan kesepakatan sulit diperoleh. Hal yang demikian tentu tidak akan terjadi manakala kekuasaan ada pada satu orang. Menurut Thomas Hobbes, untuk menunjang kekuasaannya, seorang penguasa monarkhi mempunyai hak-hak istimewa, diantaranya hak menetapkan seorang

pengganti kelak jika ia berhalangan atau meninggal dunia. Penguasa boleh menunjuk seorang menjadi penguasa yang berasal dari kalangan manapun, termasuk anggota keluarganya sendiri, yang penting penguasa penggantinya itu mampu melakukan kewajibannya sebagai pemegang kekuasaan atau tidak. Dari sini dapat dilihat bahwa Thomas Hobbes tidak menafikan adanya nepotisme, bahkan membenarkan pengangkatan seorang penguasa berdasarkan keturunan. Menurut Thomas Hobbes, ada tiga tahap dalam perjanjian social atau kontrak social, yaitu :

1. Keadaan alamiah, bercirikan :
 - a. Tanpa adanya kekuasaan politik,
 - b. Terjadi kekacauan politik karena adanya kebebasan mutlak,
2. Tahap perjanjian social, timbul akibat keadaan alamiah, tujuannya untuk membentuk kekuasaan politik yang lebih kuat dari siapapun juga untuk mengatur masyarakat.
3. Tahap Commonwealth, telah terbentuk kekuasaan politik yang mutlak.

RINGKASAN

Thomas Hobbes merupakan salah satu filsuf di abad pertengahan yang memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran mengenai konsep demokrasi modern dan negara demokrasi konstitusional. Salah satu buku karya Thomas Hobbes adalah Leviathan, yang bermakna negara raksasa, mengandung makna bahwa untuk menciptakan kedamaian, ketentraman dalam masyarakat, negara harus kuat, memiliki kekuasaan yang tanpa batas, artinya dapat menjatuhkan hukuman yang berat kepada setiap pelanggar undang-undang. Negara mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Menurut Thomas Hobbes, negara terbentuk karena perjanjian bersama antar warga, bukan dengan negara, sehingga kedudukan negara adalah terpisah. Dalam keadaan

alamiah manusia pada hakekatnya ingin bertindak tanpa batas, ingin bebas, sehingga terjadi hukum rimba.

EVALUASI :

1. Jelaskan bagaimana keadaan alamiah manusia menurut Thomas Hobbes ?
2. Jelaskan bagaimana terbentuknya negara atau kekuasaan politik menurut Thomas Hobbes ?
3. Jelaskan isi buku Leviathan ?
4. Jelaskan bagaimana pandangan Thomas Hobbes tentang manusia ?
5. Jelaskan bagaimana negara ideal menurut Thomas Hobbes ?

REFERENSI :

1. Noer, Deliar, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Rajawali, Jakarta, 1982
2. Abbas, Bakri, *Empat Pemikiran Politik Barat, Penerapannya di dunia Modern*, IISIP Jakarta, 2003,
3. Syafiie, *Filsafat Pemerintahan, Mencari bentuk Good Governance yang sebenarnya secara Universal*, PT Perco, Jakarta, 2001

,

B A B VI

PEMIKIRAN JOHN LOCKE DAN J.J. ROUSSEAU

TUJUAN PEMBELAJARAN :

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan memahami dan mengerti pemikiran John Locke dan J.J. Rousseau tentang konsep pemerintahan dan penerapannya di negara modern.

A. PEMIKIRAN JOHN LOCKE

John Locke adalah seorang filsuf modern yang banyak memberikan sumbangan pemikiran tentang perkembangan konsep negara dan pembagian kekuasaan dalam negara. John Locke dilahirkan di Inggris tahun 1632. Ia merupakan seorang yang menentang kekuasaan yang mutlak di tangan penguasa.

Buku yang terkenal dari John Locke yaitu *Two Treatise of Government* (Uraian Tentang Pemerintahan). Dalam buku yang pertama, John Locke menolak pendapat yang mengatakan bahwa kekuasaan didasarkan pada warisan seperti yang terdapat pada hubungan keluarga, sebagaimana dikatakan Sir Robert Filmer. Filmer berpendapat bahwa kekuasaan memerintah mulanya diberikan Tuhan kepada Adam yang kemudian diturunkan kepada pewarisnya. Hak dan kekuasaan raja sama dengan hak dan kekuasaan ayah terhadap anaknya. Tabiat alam sendiri menentukan bahwa anak-anak tidak pernah bebas dari kekuasaan si ayah, walaupun si anak telah dewasa.

Berdasarkan pendapat tersebut, John Locke mengatakan bahwa Adam hanya mungkin mempunyai seorang “ putera mahkota “ kalau kekuasaan itu turun menurun. Tetapi siapa putra mahkota tersebut tidak seorangpun mengetahuinya, walaupun diketahui, Locke menanyakan apakah semua penguasa yang ada mau menyerahkan kekuasaannya kepada putra mahkota itu, hal itu masih meragukan. Menurut John Locke, kekuasaan ayah hanyalah bersifat sementara, tidak terus

menerus dan terbatas. Kekuasaan ini tidak sampai pada masalah hidup matinya si anak. Harta benda si anak di bawah kekuasaannya sendiri.

Dalam bukunya yang ke dua persoalan itu dijelaskan kembali bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak sebenarnya merupakan kewajibannya untuk membela dan membelai anaknya untuk mendidiknya sampai dewasa dan mampu mandiri, di mana kekuasaan itu melemah dan kemudian berakhir. Ini bukan berarti anak kemudian mengabaikan orang tua, karena bagaimanapun juga anak mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi martabat orang tua. Pada saat anak masih menjadi kewajiban orang tua, kadang kekuasaan dilakukan dengan kekerasan, namun disertai dengan kasih sayang. Dengan demikian sebenarnya manusia itu lahir dengan persamaan dan kebebasan yang didapatkannya sesuai dengan perkembangan diri dan akalnya.

B. FORMAT NEGARA IDEAL MENURUT JOHN LOCKE

Dalam menganalisa format negara ideal, John Locke memulai dari konsep keadaan alamiah manusia. Menurutnya keadaan alamiah tidak sama dengan masyarakat dalam keadaan perang. Keadaan alamiah menurut John Locke adalah ketidakpastian dan ketidakaturan. Keadaan alamiah merupakan keadaan dimana manusia hidup dalam kedamaian, kebajikan, saling melindungi, penuh kebebasan, tak ada rasa takut dan penuh kesetaraan. Kebebasan yang ada bukan kebebasan tanpa batas, tetapi dibatasi oleh hukum alam. Hukum ini memberikan ketentuan bahwa tidak seorangpun boleh atau dibenarkan merusak soal hidup mati, kesehatan, kemerdekaan atau milik orang lain. Keadaan alamiah yang penuh damai tersebut berubah setelah manusia menemukan system moneter dan uang., di mana kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan yang dapat berakhir dengan perang. Keadaan alamiah selalu merindukan kehidupan yang alamiah. Dalam keadaan alamiah manusia, daya nalar merupakan penggerak manusia, sehingga untung rugi merupakan pertimbangan untuk melakukan sesuatu. Pelaksanaan hukum alam terletak pada tangan masing-masing orang, sehingga tiap orang berhak menghukum pelanggar-

pelanggarnya, tetapi orang yang menghukum tidak boleh menurutkan kata hatinya, nafsu dan amarahnya, namun harus berdasarkan akal budi dan kesadarannya bahwa penerapan hukum harus sesuai dengan pelanggarannya.

Tetapi manusia mempunyai kecenderungan untuk pilih kasih, sehingga tidak pantaslah kalau dia bertindak sebagai hakim atas pelanggaran yang terjadi, ditambah dengan sifat manusia yang sulit untuk mengendalikan diri sehingga dapat berbuat tanpa batas yang bisa menimbulkan kekacauan. Keadaan yang demikian menuntut adanya badan tersendiri yang mempunyai kekuasaan politik, yakni yang mempunyai hak untuk membuat undang-undang, mengatur dan memelihara milik, untuk menggunakan kekuatan masyarakat dalam menjalankan hukum tersebut dan dalam mempertahankan negara terhadap serangan dari luar, yang semuanya bertujuan untuk kebaikan bersama. Terbentuknya masyarakat politik (negara) disebabkan karena kesadaran masyarakat akan kekurangan yang ada dalam keadaan alamiah, sehingga pembentukannya adalah dengan kemauan dan izin mereka sendiri bukan dengan paksaan. Dalam perjanjian tersebut, tiap orang menyerahkan kekuasaan, bukan hak kepada masyarakat yang dibentuk untuk melaksanakan hukum. Perjanjian itu berdasarkan suara mayoritas. Dalam masyarakat politik tersebut, masyarakat masih dapat mengemukakan tuntutan dan meminta perhatian masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga kekuasaan masih berada di tangan rakyat. Penguasa hanya sebagai telangkai dari masyarakat tadi.

Salah satu fungsi dari negara menurut John Locke adalah melindungi hak milik (Property). Dalam keadaan alamiah tidak ada hak milik, yang ada adalah kepemilikan tanpa dilindungi oleh penguasa. Hak milik tidak bias dicabut dari seseorang karena merupakan bagian dari seorang itu, sehingga kalau dicabut dia tidak bisa lagi menikmati hidup. Nilai suatu benda ditentukan oleh nilai tenaga kerja benda tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai hak milik karena telah mengerjakan benda tersebut. Hak milik terdiri dari dua unsure, yaitu benda alam ditambah dengan nilai terhadap tenaga yang dikeluarkan oleh orang yang mengerjakan.

Berkaitan dengan pelaksanaan hukum alam, John Locke berpendapat bahwa keberadaan negara diperlukan guna menetapkan dan melaksanakan hukum alam supaya manusia berada dalam ketertiban dan keteraturan serta dapat meningkatkan kualitas kehidupannya. Pemerintah harus melaksanakan kewenangan berdasarkan hukum, di samping itu pembuat hukum harus dipisahkan dari pelaksana hukum dan pengadilan, Inilah yang kemudian terkenal dengan konsep “ Trias Politica “

Berdasarkan konsep Trias Politica tersebut, John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang.

- Merupakan kekuasaan politik tertinggi,
- terdiri dari wakil orang kaya dan bangsawan,
- Undang-undang yang dihasilkan mengikat eksekutif,
- Undang-undang yang dibuat harus dibuat untuk kesejahteraan umum,
- Tidak boleh bertindak sewenang-wenang,
- Tidak boleh menyita milik tanpa izin dan harus bertindak adil,
- Tidak boleh menyerahkan hak legislatifnya kepada pihak lain.

2. Kekuasaan Eksekutif

- Merupakan pelaksana hukum atau undang-undang,
- Mempunyai masa kerja yang bersifat lestari,
- Kedudukannya tergantung legislative,
- Mempunyai hak prerogative yang kadang bertentangan dengan undang-undang, tetapi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum,
- Apabila menyalahgunakan kewenangannya, dapat dilengserkan oleh rakyat

3. Kekuasaan federatif

- Merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan luar negeri,
- Tunduk kepada legislative.

C. PANDANGAN JOHN LOCKE ATAS HAK DASAR MANUSIA

John Locke sebagai seorang filsuf modern mempunyai pandangan yang perlu mendapat perhatian, yakni mengenai hak dasar manusia. Dalam pandangannya, manusia mempunyai tiga hak dasar yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, yaitu hak hidup (Life), hak kebebasan (liberty) dan hak milik (property). Setiap manusia memiliki dan mengembangkan hak tersebut sesuai keinginannya. Keberadaan pemerintah diperlukan untuk melindungi pencapaian hak-hak tersebut bagi individu sehingga tidak terjadi pelanggaran oleh individu terhadap individu lainnya.

Hak untuk Hidup (life) merupakan John Locke merupakan hak yang paling asasi untuk kehidupan manusia. Mereka harus mendapatkan perlindungan dari semua ancaman dan segala sesuatu yang dapat membahayakan eksistensi kehidupannya.

Hak Kebebasan (liberty) merupakan cikal bakal tumbuhnya paham liberalisme dalam perkembangan masyarakat Barat. Pada prinsipnya semua orang harus mendapatkan kebebasan untuk melakukan apa saja yang diinginkannya. Fungsi pemerintah adalah mengatur supaya kebebasan tersebut tidak merugikan atau dapat mengorbankan kebebasan individu lainnya.

Hak milik (property) merupakan hak setiap individu untuk mendapatkan dan mengumpulkan hak milik, seperti harta benda sebebaskan tanpa ada pembatasan. John Locke menjelaskan bahwa hak tersebut ditentukan oleh nilai tenaga kerja yang dapat diserap oleh benda tersebut. Untuk mendapatkan atau menghasilkan benda, seseorang harus dapat mengerjakan atau memasukkan “ labor “ ke dalam benda tersebut. Oleh karena itu, hak milik yang dimiliki seseorang merupakan hak prinsip untuk mendapatkan perlindungan negara. Prinsip ini merupakan salah satu nilai kapitalisme di negara barat.

D. PEMIKIRAN JEAN JACQUES ROUSSEAU

Jean Jacques Rousseau terkenal sebagai bapak dari gerakan romantic yang menjelma di Eropa abad ke 18. Ia dilahirkan di Jenewa tahun 1712. Orang dari golongan romantic akan menangis melihat keluarga miskin, tetapi bersikap dingin

terhadap upaya untuk memperbaiki nasibnya. Ia memuja kehidupan desa yang dianggap masih suci, yang berlainan dengan kehidupan kota. Si miskin lebih berkebajikan daripada si kaya.

Rousseau berpendapat bahwa dalam keadaan alamiah, manusia pada hakekatnya adalah baik, bukan manusia yang suka perang, sebab tidak terdapat rasa benci, dendam dan iri hati pada dirinya. Kalaupun terjadi konflik, manusia akan menghindari perang, sehingga perang bukanlah merupakan fenomena alamiah, melainkan fenomena social. Manusia menjadi buruk perilakunya, tidak lagi menjadi manusia alamiah, adalah karena masyarakat sekitarnya serta peradaban modernnya telah membuatnya demikian. Peradaban dan masyarakat modern secara bertahap mengikis sifat-sifat luhur manusia. Rousseau berpendapat bahwa teori kontrak social merupakan alat untuk mengetahui bagaimana rakyat mengatur dirinya sendiri, tetapi bukan menjadi tunduk kepada orang lain dan tetap bebas seperti sediakala, serta bagaimana caranya manusia bisa hidup bebas dan pada saatnya yang sama tunduk pada kekuasaan

E. NEGARA IDEAL MENURUT JEAN JACQUES ROUSSEAU.

Karya terkenal dari J. J. Rousseau adalah “ *The Social Contract* “. Dalam bukunya di katakana bahwa dalam keadaan alamiah manusia dilahirkan dalam keadaan bebas, tetapi di mana-mana ia dalam keadaan terbelenggu. Keadaan alamiah baginya penuh dengan keinginan nafsu dan naluri, sehingga manusia tidak ubahnya sebagai budak, yakni budak dari nafsu, keinginan dan naluri. Kebebasan manusia adalah kebebasan alami, berupa hak-hak yang tiada tentu dan tak terbatas untuk mengambil apa saja yang menjadi keinginannya. Hak-hak tersebut hanya dapat ditegakkan selama manusia itu cukup kuat untuk mempertahankannya. Keadaan yang serba tidak menentu inilah yang kemudian menimbulkan perjanjian bersama. Tiap sekutu yang membentuk masyarakat atau badan politik menyerahkan semua haknya kepada sekutu, sehingga tiap orang berada dalam keadaan yang sama dengan orang lain dalam persekutuan tersebut. Kebebasan manusia tetap terjamin, karena tiap sekutu tidak menyerahkan apa-apa kepada teman sekutunya melainkan kepada

persekutuan itu dalam keseluruhan. Oleh karenanya tiap sekutu hanya patuh kepada dirinya sendiri dan tinggal tetap bebas seperti sediakala. Kebebasan yang demikian tidak sama dengan kebebasan alami, melainkan merupakan kebebasan sipil, yaitu kebebasan yang disokong oleh kemauan bersama. Menurut Jean Jacques Rosseau, sejarah manusia telah melalui empat tahap, yaitu ::

1. Tahap primitive atau awal kehidupan manusia ketika manusia hidup dalam suasana damai, harmonis dan bebas dari segala bentuk dominasi,
2. Tahap pembentukan inti masyarakat. Dalam tahap ini untuk pertama kalinya terusun lembaga hak milik pribadi,
3. Penemuan metalurgi dan pertanian yang pada gilirannya menimbulkan perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, yang menyebabkan ketimpangan dalam pemilikan harta,
4. Sebagai akibat ketimpangan kepemilikan harta benda tersebut, maka timbul konflik antara orang kaya dengan miskin, yang menyebabkan kekacauan social.

Untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban social perlu dibentuk negara yang menyelenggarakan kewenangannya berdasarkan kontrak social dan “ Kehendak umum “. Kehendak umum adalah kehendak bersama semua individu yang mengarah pada kepentingan bersama atau kepentingan umum. Apabila negara merupakan ungkapan kehendak warganya, maka manusia tidak akan mengalami pemasungan kebebasannya, karena kehendak negara adalah kehendak mereka sendiri. Negara betul betul sebagai Republik atau Urusan Umum. Negara tidak lagi asing karena ia bukan milik raja atau sekelompok orang melainkan milik semua orang. Negara yang sah adalah Republik, karena rakyatlah yang memiliki kedaulatan, sehingga negara harus menjadi urusan seluruh rakyat.

Menurut Rousseau, kedaulatan rakyat, mengimplikasikan dua asumsi, yaitu :

1. Penolakan terhadap segala wewenang di atas rakyat yang bukan untuk kepentingan rakyat. Rakyat berwenang penuh untuk menentukan apa yang

mereka inginkan, sehingga tidak ada pihak manapun yang mempunyai wewenang atas rakyat,

2. Segala kekuasaan yang ada harus selaras dengan keinginan rakyat. Negara tidak berhak untuk meletakkan kewajiban apapun kepada rakyat, karena rakyat memiliki wewenang penuh untuk mengatur dirinya sendiri.

Namun satu hal yang kontradiktif dari Rousseau, yakni bahwa dia berpendapat sesungguhnya walaupun rakyat bertindak sebagai pencipta hukum bagi dirinya sendiri, namun sebenarnya mereka tidak tahu apa yang paling baik bagi dirinya. Karena itu perlu ditunjuk pimpinan seorang legislator, pembuat dasar hukum bagi negara atau konstitusi negara, tetapi ia tidak memiliki tugas apapun dalam konstitusi tersebut. Pemegang kekuasaan eksekutif dan legislative adalah rakyat.

Paham kedaulatan rakyat menurut Rousseau juga menolak adanya lembaga perwakilan rakyat. Kedaulatan rakyat tidak dapat diwakili oleh siapapun. Sistem perwakilan, misalnya yang ditetapkan melalui pemilu, tidak akan pernah bisa mewakili rakyat dalam arti yang sebenarnya, karena keinginan wakil rakyat berbeda dengan rakyat. Hubungan rakyat dengan negara harus bersifat langsung. Sistem perwakilan dianggap sebagai bentuk kemalasan orang untuk menaruh perhatian terhadap masalah umum dan nafsu akan uang. Oleh karena itu ketelibatan rakyat dalam pemerintahan haruslah bersifat langsung, tanpa melalui dewan perwakilan rakyat, sebagai bukti dari manusia yang telah merdeka.

Sebagai konsekuensinya, negara harus tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Negara yang luas akan menyulitkan proses keterlibatan rakyat secara langsung dalam pemerintahan, tetapi kalau terlalu kecil akan sulit bagi negara untuk mempertahankan diri. Pendapat ini menunjukkan Rousseau hendak mengendalikan kehidupan politis dimana masyarakat terhimpun dalam negara-negara kecil dan rakyat bisa terlibat secara langsung dalam pemerintahan, sesuatu yang sangat berlawanan dengan kenyataan sejarah yang berkembang pada masanya yang mengarah pada perkembangan negara yang luas dan bersendikan nasionalisme.

Rousseau juga berpandangan tentang hubungan antara agama dan negara. Baginya agama yang benar adalah agama yang memperkuat kehidupan negara. Dia menolak agama Kristen sebagai agama negara, karena menurutnya agama ini mengutamakan isolasi diri dan membagi secara dikhotomi antara dunia dan rohani. Ia menginginkan agama yang bisa memadukan kedua hal tersebut, satu sama lain saling menguatkan. Anehnya, walaupun memandang agama Islam adalah benar, namun dia tidak tertarik untuk masuk Islam.

Pemikiran Rousseau tentang meleburnya kehendak individu ke dalam negara merupakan peluang terjadinya totaliterisme dalam kehidupan bernegara. Menurut Rousseau manusia mengharapkan kebebasan total dalam kehidupan negara atau kehidupan rakyat tidak terbatas. Oleh karena itu, kehendak negara harus identik total dengan kehendak semua individu, begitu pula sebaliknya, artinya bahwa individu secara total juga masuk dalam kehidupan negara. Dengan demikian, negara harus diletakkan di atas segala-galanya, karena pada hakekatnya negara tersebut merupakan representasi total dari kehendak rakyat. Hal ini merupakan kebersamaan yang ditonjolkan Rousseau dalam setiap proses pengambilan keputusan yang akan mematikan kehendak minoritas. Minoritas harus menyesuaikan diri dengan kelompok mayoritas, kalau tidak mau, maka akan dihancurkan. Di sini secara tidak langsung, ia melegitimasi lahirnya konsep tirani mayoritas.

Selain konsep tirani mayoritas, Rousseau juga memberikan peluang adanya system totaliter pada Negara, hal ini terlihat pada identifikasi kehendak bersama dengan Negara. Negara merupakan sesuatu yang abstrak, sehingga bisa jatuh pada sekelompok orang atau penguasa dictator yang mengatasnamakan kepentingan bersama atau kepentingan Negara.

Namun terlepas dari kelemahan yang ada pada pemikiran Rousseau, ia telah memberikan pemikiran yang berarti dalam usaha mewujudkan idealisme Negara yang baik. Negara mempunyai kekuasaan penuh dan dapat menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga negara. Setiap warga Negara taat kepada pemerintah, namun

tetap dapat memperoleh jaminan hukum untuk dapat melindungi kepentingan yang asasi, sehingga Negara memiliki kedaulatan yang berasal dari rakyat.

RINGKASAN

John Locke dan Jean Jacques Rousseau adalah dua filosof yang memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep Negara dan pembagian kekuasaan di dalam Negara. Kedua pemikir tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dalam melihat konsep Negara, bentuk Negara dan mekanisme penyelenggaraannya yang dapat menjamin hak-hak rakyat, tujuan Negara utama dan hal-hal lain yang berkaitan dengan moral dan kebajikannya.. John Locke dalam karyanya Two Treatise Of Government menerangkan tentang perubahan masyarakat sampai terbentuknya sebuah Negara.

J.J . Rousseau berpendapat bahwa teori social merupakan alat untuk mengetahui bagaimana rakyat mengatur dirinya sendiri, tetapi bukan menjadi tunduk kepada orang lain dan tetap bebas seperti semula, serta bagaimana caranya manusia bisa hidup bebas dan pada saatnya yang sama tunduk pada kekuasaan.

EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan pendapat antara John Locke dengan J.J. Rousseau tentang keadaan alamiah manusia.?
2. Jelaskan Isi buku Two Treatise Of Government dari John Locke ?
3. Jelaskan perbedaan format Negara ideal menurut John Locke dan J.J Rousseau ?
4. Jelaskan Isi buku The Social Contract dari J.J. Rousseau ?

DAFTAR PUSTAKA

1. Abbas, Bakri, *Empat Pemikiran Politik Barat, Penerapannya di dunia Modern*, IISIP Jakarta, 2003
2. Noer, Deliar, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Rajawali, Jakarta, 1982
3. Syafiie, *Filsafat Pemerintahan, Mencari bentuk Good Governance yang sebenarnya secara Universal*, PT Perco, Jakarta, 2001
4. Wukirsari, Nicccolo Machiavelli, *Il Principe Sang Penguasa*, PT.Gramedia, Jakarta, 1986

REFERENSI

1. Abbas, Bakri, *Empat Pemikiran Politik Barat, Penerapannya di dunia Modern*, IISIP Jakarta, 2003
2. Abbas, Pengantar filsafat alam, Al Ikhlas, Surabaya, 1981
3. Bakry, Systematik Filsafat, Widjaya, Jakarta, 1989
4. Budiardjo, Miriam, Dasar Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, 1991
5. Kencana, Syafiie, Inu, Pengantar Ilmu Pemerintahan, PT Eresco, Jakarta, 2005
6. Noer, Deliar, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Rajawali, Jakarta, 1982
7. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Pers, Jakarta, 1988
8. Sudarsono, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
9. Suseno, Franz, Magnis, Etika Politik, Gramedia, Jakarta, 1987
10. Syafiie, *Filsafat Pemerintahan, Mencari bentuk Good Governance yang sebenarnya secara Universal*, PT Perco, Jakarta, 2001
11. Wukirsari, Niccolo Machiavelli, *Il Principe Sang Penguasa*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986